



TAHUN 2026

**RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH (RENJA- PD) PROVINSI RIAU
TAHUN 2026**

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI RIAU**

GEDUNG MENARA LANCANG KUNING LT,4
DAN LT. 5 JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 460
TELP. 0761 – 22900, 39596, FAX. 0761 – 28066, 39494



SALINAN

GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 38 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 November 2025

Plt. GUBERNUR RIAU,

TTD

S. F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 November 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19840326 200903 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai bahan acuan dan pedoman dalam menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Rancangan Awal Rencana Kerja ini berisi Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2026, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini tentu masih ada kekurangan, oleh karena itu sangat diharapkan saran masukan demi pelaksanaan yang lebih baik dimasa mendatang.

Pekanbaru, Oktober 2025

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Riau



Ir. H. M. TAUFIQ OESMAN HAMID, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19680718 200003 1 003

DAFTAR ISI

	HAL
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistimatika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun 2024 dan capaian Renstra PD.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	37
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	42
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	83
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	91
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional.....	91
3.2 Tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah.....	98
3.3 Program dan kegiatan.....	99
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	110
BAB V PENUTUP.....	141
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel.T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)* Provinsi Riau.....	28
Tabel.T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau	36
Tabel.T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau.....	44
Tabel.T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Riau.....	85
Tabel.T-C.33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Riau.....	112

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan bahwa Perencanaan Pembangunan dibagi menjadi beberapa tahapan mulai dari Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan.

Peraturan Perundang-undangan tersebut, secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan untuk periode tahunan dan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Secara tidak langsung Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu kepada Rencana Strategis 2025–2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau 2026 serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 serta permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2025–2026. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau merupakan penjabaran dari langkah- langkah yang

telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025-2026 dan RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau 2025-2026, sehingga Rencana Kerja yang disusun akan menentukan hasil dari keseluruhan proses rencana pembangunan.

1.2. Dasar Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau 2026 mengacu kepada:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- d. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- e. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian;
- f. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- r. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi 2018-2038;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
- t. Peraturan Gubernur Riau Nomor 75 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Provinsi Riau.
- u. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- v. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3).
- w. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 tahun 2025 Tentang Rencana Kerja

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2026 adalah:

- a. Sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2026;
- b. Untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau;
- c. Untuk mengintegrasikan peran berbagai *stakeholder* terkait baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga, asosiasi dalam pelaksanaan pembangunan sektor Industri Provinsi Riau.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2026 adalah untuk:

- a. Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Riau serta Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau;
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan urusan industri, perdagangan, Koperasi dan UKM baik antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan urusan Industri, perdagangan, Koperasi dan UKM di Provinsi Riau;
- d. Mengoptimalkan peran Pemerintah, Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas urusan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- e. Tercapainya pemanfaatan alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan urusan Industri, perdagangan, Koperasi dan UKM di Provinsi Riau secara efisien dan efektif.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, berisikan Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024,

Berisikan uraian mengenai: Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, Memaparkan Telaahan Terhadap Kebijakan Industri Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai Hasil inputan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada SIPD RI sesuaikan target indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan.

BAB V PENUTUP,Menguraikan rangkuman tentang hal-hal pokok yang termuat dalam dokumen Rancangan Renja 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD.

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2024 adalah :

- PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
 - Kegiatan : Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan target 5 unit usaha realisasi 0 unit usaha. Ini dikarenakan Pemahaman pengurus koperasi terhadap proses permohonan perizinan belum memadai sehingga tidak memahami tentang perizinan untuk pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam. Sesuai dengan Permenkop No. 8 Tahun 2023 Tentang Izin Simpan Pinjam terdapat penambahan dan perubahan persyaratan izin yang sulit untuk dilengkapi oleh pengurus koperasi.

- PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI.
 - Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha dengan target 25 unit usaha realisasi 0 unit usaha. Ini disebabkan karena adanya rasionalisasi

anggaran sehingga anggaran untuk melakukan kegiatan ini didrop.

➤ PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

- Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas

Sub Kegiatan : Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas dengan target 50 orang realisasi 15 orang. Ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran Kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di 3 Kab menjadi hanya dilaksanakan 1 Kab saja.

➤ PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- Kegiatan : Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen dengan target 3 BPSK realisasi 1 BPSK. Ini disebabkan karena dalam pembentukan BPSK membutuhkan dana yang besar.

Sub Kegiatan : Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen dengan target 10 LPKSM realisasi 1 LPKSM. Ini disebabkan karena Berdasarkan Permendag 35 tahun 2021 pasal 2 dan pasal 3 kewenangan TDLPK berada pada Pemerintah Provinsi Riau Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sudah melakukan identifikasi keberadaan LPKSM yang pernah terdaftar di Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau sebagian besar LPKSM tersebut sudah tidak aktif secara aktifitas maupun kelembagaan oleh karena itu DisperindagKop UKM Provinsi Riau melakukan sosialisasi dan edukasi di kabupaten kota terhadap peraturan baru peralihan kewenangan TDLPK / LPK sesuai permendag 35 tahun 2021 , namun sampai saat ini masih belum ada lpksm tersebut yang mendaftar ulang, adapun lembaga baru sudah mengajukan penerbitan TDLPK dan saat ini masih dalam proses verifikasi kelengkapan dokumen.

- Kegiatan : Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : Pemantauan Mutu Produk dengan target 36 produk realisasi 0. Ini disebabkan anggaran perjalanan dinas dirasionalisasi sehingga tidak dapat melakukan pengambilan contoh ke lokasi produksi UMKM untuk diuji mutu produknya.
 Sub Kegiatan : Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi dengan target 80 sertifikat realisasi 4 sertifikat. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) UPT. PSMB tidak lagi ditunjuk sebagai Lembaga Sertifikasi Produk untuk ruang lingkup air mineral dan air demineral sesuai keputusan Meteri Perindustrian No. 4057 Tahun 2023 tentang penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk penerapan SNI secara wajib pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). LSPro UPT. PSMB tidak ditunjuk karena kemampuan ruang lingkup Akreditasi LabUji < 60% (58,5%) dimana persyaratan Kementerian Perindustrian untuk dapat ditunjuk sebagai Labpendukung LSPro komoditi SNI wajib ruang lingkup akreditasi Lab Uji > 60%. Akibatnya LSPro UPT. PSMB kehilangan 90% klien dan harus mentransfer klien tersebut ke LSPro yang ditunjuk.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 77.231.843 dengan realisaasi anggaran sebesar Rp 68.910.658 (89,23 %)
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 46.856.950 dengan realisaasi anggaran sebesar Rp 36.789.280 (78,51

%)

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 74.658.741 dengan realisaasi anggaran sebesar Rp 50.889.069 (68,16 %)

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp 41.619.520.406 dengan realisaasi anggaran sebesar Rp 39.097.691.634 (93,94 %)

3. Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah

- Sub kegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp 173.009.837 dengan realisaasi anggaran sebesar Rp 154.155.488 (89,10 %)

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub kegiatan antara lain :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 197.999.117 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 197.483.631 (99,74 %)
- Penyediaan bahan logistik kantor dengan anggaran sebesar Rp 450.133.054 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 239.015.000 (53,10 %)
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp 296.117.222 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 282.714.105 (95,47 %)
- Penyelenggaraan rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 927.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 624.828.071 (67,37 %)

5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub kegiatan antara lain :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp

2.399.820.875 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.267.321.500,5 (52,81 %)

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 2.671.806.376 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.875.724.119 (70,20 %)

6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp 737.499.996 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 697.725.145 (94,61 %)
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran sebesar Rp 3.314.621.984 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.229.061.997 (97,42 %)

7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan anggaran sebesar Rp 839.958.580 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 839.958.580 (100 %)
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp 90.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 89.945.000 (99,04 %)

B. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
 - Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah

Keanggotaan Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 90.513.553 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 79.062.723 (87,35 %)

C. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub kegiatan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, likuiditas, Jatidiri Koperasi, pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi dengan anggaran sebesar Rp 273.382.770 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 255.902.305 (93,61 %)

D. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

1. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
 - Sub kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi dengan anggaran sebesar Rp 4.616.683.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.998.614.851 (86,61 %)

E. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

1. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi

- Peningkatan produktifitas nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan penguatan kelembagaan, penataan manajemen , standarisasi dan restrukturisasi usaha dengan anggaran sebesar Rp 102.597.622 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 82.640.441 (80,55 %)

G. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

1. Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
 - Menumbuh kembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan anggaran sebesar Rp 556.350.903 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 535.576.766 (96,27 %)

H. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

1. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.
 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi dengan anggaran sebesar Rp 1.989.431.230 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.823.725.560 (91,67 %)

I. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

1. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha

Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor

- Fasilitasi pemenuhan komitmen SIUP-MB toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan anggaran sebesar Rp 10.110.031 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.994.959 (29,62 %)
2. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi
- Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan anggaran sebesar Rp 40360770 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 23195000 (57,47 %)
3. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan angka pengenal importer (API)
- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA dengan anggaran sebesar Rp 34.239.705 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 33.652.000 (98,28 %)

J. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

1. Pembangunan dan Pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas
- Penataan Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas dengan anggaran sebesar Rp 59.999.731 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 51.169.300 (85,28 %)

K. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG

KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor dengan anggaran sebesar Rp 136.438.303 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 108.081.316 (79,22 %)
2. Pengendalian harga informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas Kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan
 - Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 101.538.497 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 84.756.300 (83,47 %)
 - Operasi pasar dalam rangka stabilitasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 1.477.175.942 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 989.369.854 (66,98 %)
3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida dengan anggaran sebesar Rp 87.736.480 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 69.998.347 (79,78 %)
 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan anggaran sebesar Rp 143.218.697

dengan realisasi anggaran sebesar Rp 111.687.686
(77,98 %)

L. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan dengan anggaran sebesar Rp 147.684.399 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 134.269.706 (90,92 %)

M. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen dengan anggaran sebesar Rp 531.170.624 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 504.195.487 (94,92 %)
 - Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen dengan anggaran sebesar Rp 20.170.052 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.645.052 (57,73 %)
2. Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen dengan anggaran sebesar Rp 414.473.053 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 331.626.441 (80,01 %)
3. Pelaksanaan Pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh Daerah Kabupaten/Kota

- Pemantauan Mutu Produk dengan anggaran sebesar Rp 46.364.800 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 46.364.800 (100 %)
- Pengembangan layanan pengujian dengan anggaran sebesar Rp 267.444.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 248.845.440 (93,05 %)
- Pengembangan layanan sertifikasi dengan anggaran sebesar Rp 179.849.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 72.594.418 (40,36 %)
- Pengembangan layanan Kalibrasi dengan anggaran sebesar Rp 89.540.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 66.043.100 (73,76 %)

N. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGRI

1. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 80.169.357,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 48.068.814 (59,96 %)
2. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 72.840.430,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 61.770.500 (84,80 %)

O. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Penyusunan, penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan industri Provinsi
 - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri dengan anggaran sebesar Rp

2.630.275.621,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.006.287.767 (76,28 %)

- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 7.511.069.266,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.055.670.196 (80,62 %)
- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri dengan anggaran sebesar Rp 2.257.027.433,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.095.061.862 (92, 82 %)
- Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri dengan anggaran sebesar Rp 522.758.865,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 443.818.782,- (84,90 %)

P. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 192.441.715,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 154.332.715,- (80,20 %)

Q. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data industri, Data kawasan industri serta data lain ligkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri

Nasional(SIINas) dengan anggaran sebesar Rp 107.954.689,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 91.652.761,- (84,90 %)

- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas dengan anggaran sebesar Rp 95.999.839,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 92.688.677,- (96,55 %)

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target.

Pada tahun ini tidak ada program/kegiatan yang capaiannya melebihi target maka dari itu tidak dapat disimpulkan faktor penyebabnya

2.1.4 Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya , terpenuhinya atau melebihi target kinerja Realisasi program/kegiatan

➤ PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

- Kegiatan : Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang,Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi dengan target 5 unit usaha realisasi 0 unit usaha.

Faktor penyebab tidak tercapainya realisasi program/kegiatan adalah dikarenakan Pemahaman pengurus koperasi terhadap proses permohonan perizinan belum memadai sehingga tidak memahami tentang perizinan untuk pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam. Sesuai dengan Permenkop No. 8 Tahun 2023 Tentang Izin Simpan Pinjam terdapat

penambahan dan perubahan persyaratan izin yang sulit untuk dilengkapi oleh pengurus koperasi.

- PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI.
 - Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha dengan target 25 unit usaha realisasi 0 unit usaha.
Faktor penyebab tidak tercapainya realisasi program/kegiatan adalah disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga anggaran untuk melakukan kegiatan ini didrop.

- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
 - Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
Sub Kegiatan : Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas dengan target 50 orang realisasi 15 orang.
Faktor penyebab tidak tercapainya realisasi program/kegiatan adalah disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran Kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di 3 Kab menjadi hanya dilaksanakan 1 Kab saja.

- PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
 - Kegiatan : Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen dengan target 3 BPSK realisasi 1 BPSK. Ini disebabkan karena dalam pembentukan BPSK membutuhkan dana yang besar.

Sub Kegiatan : Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen dengan target 10 LPKSM realisasi 1 LPKSM.

Faktor penyebab tidak tercapainya realisasi program/kegiatan adalah disebabkan karena Berdasarkan Permendag 35 tahun 2021 pasal 2 dan pasal 3 kewenangan TDLPK berada pada Pemerintah Provinsi Riau Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sudah melakukan identifikasi keberadaan LPKSM yang pernah terdaftar di Pemerintah Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau sebagian besar LPKSM tersebut sudah tidak aktif secara aktifitas maupun kelembagaan oleh karena itu DisperindagKop UKM Provinsi Riau melakukan sosialisasi dan edukasi di kabupaten kota terhadap peraturan baru peralihan kewenangan TDLPK / LPK sesuai permendag 35 tahun 2021 , namun sampai saat ini masih belum ada lpksm tersebut yang mendaftar ulang, adapun lembaga baru sudah mengajukan penerbitan TDLPK dan saat ini masih dalam proses verifikasi kelengkapan dokumen.

- Kegiatan : Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pemantauan Mutu Produk dengan target 36 produk realisasi 0.

Faktor penyebab tidak tercapainya realisasi program/kegiatan adalah disebabkan anggaran perjalanan dinas dirasionalisasi sehingga tidak dapat melakukan pengambilan contoh ke lokasi produksi UMKM untuk diuji mutu produknya.

Sub Kegiatan : Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi dengan target 80 sertifikat realisasi 4 sertifikat.

Faktor penyebab tidak tercapainya realisasi program/kegiatan adalah Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) UPT. PSMB tidak lagi ditunjuk sebagai Lembaga Sertifikasi Produk untuk ruang lingkup air mineral dan air demineral sesuai keputusan Meteri

Perindustrian No. 4057 Tahun 2023 tentang penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk penerapan SNI secara wajib pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). LSPro UPT. PSMB tidak ditunjuk karena kemampuan ruang lingkup Akreditasi LabUji < 60% (58,5%) dimana persyaratan Kementerian Perindustrian untuk dapat ditunjuk sebagai Labpendukung LSPro komoditi SNI wajib ruang lingkup akreditasi Lab Uji > 60%. Akibatnya LSPro UPT. PSMB kehilangan 90% klien dan harus mentransfer klien tersebut ke LSPro yang ditunjuk.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat daerah. Rencana Strategi yang telah di susun tidak tercapai sehingga masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan tersebut tidak terlayani dengan baik..

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut antara lain adalah perlu adanya evaluasi Renstra perangkat daerah untuk mensinkronkan target kinerja dengan keuangan daerah dan Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan APBD Tahun 2024

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI

DAN UKM PROVINSI RIAU

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
P	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	54.882.668.611	49.649.966.278	90,47	100
1	Perencanaan , Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198.747.534	156.589.007	78,79	100

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.619.520.406	39.097.691.634	93,94	100
3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	173.009.837	154.155.488	89,10	100
4	Administrasi umum perangkat daerah	1.871.749.393	1.344.040.807	71,81	100
5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5.071.627.251	3.143.045.620	61,97	100
6	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.018.055.610	4.824.540.142	96,14	100
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	929.958.580	929.903.580	99,99	100
P	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	90.513.553	79.062.723	87,35	100
	Penerbitan Izin Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	90.513.553	79.062.723	87,35	100
P	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI	273.382.770	255.902.305	93,61	100
8	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	273.382.770	255.902.305	93,61	100
P	PROGRAM	4.616.683.000	3.998.614.851	86,61	100

	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
9	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4.616.683.000	3.998.614.851	86,61	100
P	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	102.597.622	82.640.441	80,55	100
10	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	102.597.622	82.640.441	80,55	100
P	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	556.350.903	535.576.766	96,27	100
11	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku kepentingan	556.350.903	535.576.766	96,27	100
P	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.989.431.230	1.823.725.560	91,67	100
12	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	1.989.431.230	1.823.725.560	91,67	100

P	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	84.710.506	59.841.959	70,64	100
13	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor	10.110.031	2.994.959	29,62	100
14	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	40.360.770	23.195.000	57,47	100
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan angka pengenal importer (API)	34.239.705	33.652.000	98,28	100
P	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	59.999.731	51.169.300	85,28	100
	Pembangunan dan Pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas	59.999.731	51.169.300	85,28	100
P	PROGRAM	1.946.107.919	1.363.893.503	70,08	100

	STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
14	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	136.438.303	108.081.316	79,22	100
14	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	1.578.714.439	1.074.126.154	68,04	100
15	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	230.955.177	181.686.033	78,67	100
P	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	147.684.399	134.269.706	90,92	100
16	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	147.684.399	134.269.706	90,92	100
P	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.549.011.529	1.276.741.500	82,42	100

17	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	551.340.676	515.840.539	93,56	100
18	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	414.473.053	331.626.441	80,01	100
19	Pelaksanaan Pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah Kabupaten/Kota	583.197.800	429.274.520	73,61	100
P	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	125.341.946	114.942.700	91,70	100
20	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	80.169.357	48.068.814	59,96	100
21	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	72.840.430	61.770.500	84,80	100
P	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	12.921.131.185	10.600.838.607	82,04	100
20	Penyusunan, penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	12.921.131.185	10.600.838.607	82,04	100
P	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	192.441.715	154.332.715	80,20	100
21	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	192.441.715	154.332.715	80,20	100

P	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	203.954.528	184.341.438	90,38	100
22	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	203.954.528	184.341.438	90,38	100

Tabel. TC.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)* Provinsi Riau**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
I	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Unit Usaha Simpan Pinjam	20 unit usaha	10 unit usaha	5 unit usaha	5 unit usaha	100 %	5 unit usaha	20 unit usaha	100 %
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha yang difasilitasi izin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	20 unit usaha	10 unit usaha	5 unit usaha	5 unit usaha	100 %	5 unit usaha	20 unit usaha	100 %
II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang Sehat	68 unit usaha	24 unit usaha	10 unit usaha	10 unit usaha	100 %	15 unit usaha	68 unit usaha	100 %
	Pemeriksaan dan	Jumlah Koperasi	68 unit usaha	24 unit usaha	10 unit	10 unit usaha	100 %	15 unit usaha	68 unit usaha	100 %

	Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	yang patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku			usaha						
III	PROGRAM KESEHATAN KOPERASI	PENILAIAN KSP/USP	Jumlah Koperasi yang Sehat	84 unit usaha	36 unit usaha	24 unit usaha	24 unit usaha	100 %	24 unit usaha	84 unit usaha	100 %
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang dinilai Sehatnya	84 unit usaha	36 unit usaha	24 unit usaha	24 unit usaha	100 %	24 unit usaha	84 unit usaha	100 %	
IV	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	3231 orang	1815 orang	696 orang	696 orang	100 %	720 unit usaha	3231 orang	100 %	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah	Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian	3231 orang	1815 orang	696 orang	696 orang	100 %	720 unit usaha	3231 orang	100 %	
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	87 unit usaha	37 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha	100 %	25 unit usaha	87 unit usaha	100 %	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	87 unit usaha	37 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha	100 %	25 unit usaha	87 unit usaha	100 %	
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM)	33766 unit usaha	21000 unit usaha	12266 unit usaha	12266 unit usaha	100 %	200 unit usaha	33466 unit usaha	99,11 %	
	Pemberdayaan Usaha Kecil	Jumlah	33766 unit	21000 unit usaha	12266 unit	12266 unit	100 %	200 unit usaha	33466 unit	99,11 %	

	yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Usaha kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	usaha		usaha	usaha			usaha	
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Pengembangan UMKM	400 unit usaha	200 unit usaha	100 unit usaha	100 unit usaha	100 %	100 unit usaha	400 unit usaha	100 %
	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang dikembangkan dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	400 unit usaha	200 unit usaha	100 unit usaha	100 unit usaha	100 %	100 unit usaha	400 unit usaha	100 %
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
VIII	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	21 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	21 dokumen	100 %
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	100 %
	Penerbitan Surat Izin usaha	Jumlah Penerbitan	21 dokumen	7 dokumen	7	7 dokumen	100%	7 dokumen	21 dokumen	100 %

	Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Surat Izin usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan berbahaya			dokumen					
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	19500 dokumen	9500	9500	9500	100 %	10000	19500	100 %
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	1 unit	100 %
	Pembangunan dan Pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	1 unit	100 %
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 persen	100	100	100	100 %	100	100	100 %
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	3 laporan	100 %
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok	8 laporan	4 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	8 laporan	100 %

	pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan								
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	7 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100 %	1 laporan	7 laporan	100 %
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pengembangan Ekspor	248 pelaku usaha	124 pelaku usaha	62 pelaku usaha	62 pelaku usaha	100 %	62 pelaku usaha	248 pelaku usaha	100 %
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kab/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	248 pelaku usaha	124 pelaku usaha	62 pelaku usaha	62 pelaku usaha	100 %	62 pelaku usaha	248 pelaku usaha	100 %
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Standarisasi Lembaga dan Perlindungan Konsumen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 %	100 persen	100 persen	100 %
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BPSK dan LPKSM Aktif, serta Pengaduan Konsumen yang Ditangani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 %	100 persen	100 persen	100 %

	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk diseluruh Kab/Kota	Persentase Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk Seluruh Kab/Kota	100 persen	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Barang Beredar	4 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	4 laporan	100 %
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	72 umkm	24 umkm	24 umkm	24 umkm	100 %	24 umkm	72 umkm	100 %
	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	36 umkm	12 umkm	12 umkm	12 umkm	100 %	12 umkm	36 umkm	100 %
	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	36 umkm	12 umkm	12 umkm	12 umkm	100 %	12 umkm	36 umkm	100 %
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	36 dokumen	18 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100 %	9	36 dokumen	100 %
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	36 dokumen	18 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100 %	9	36 dokumen	100 %
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Dokumen Izin Usaha Industri	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	4 dokumen	100 %
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	4 dokumen	100 %

		(IPKI) Kewenangan Provinsi								
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI	Jumlah informasi industri	9 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	3 dokumen	9 dokumen	77,78 %
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	9 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	3 dokumen	9 dokumen	77,78 %
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	4 laporan	100 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 paket	0 paket	0	0	0	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	8 laporan	4 laporan	2 laporan	2 laporan	100 %	2 laporan	8 laporan	100 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintah terdiri atas beberapa perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dan saling bersinergi demi pencapaian Visi-Misi Pemerintah Provinsi Riau yang ingin di capai. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam melaksanakan capaian kinerja pelayanan perangkat daerah pada tahun 2026 mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

1. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (persentase)
2. Kontribusi PDRB sektor perdagangan (persentase)
3. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian pada level provinsi (persentase)
4. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (persentase)
5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IK K	Target Capain				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Analisis
				Tahun (n-2) 2024	Tahun (n-1) 2025	Tahun (n) 2026	Tahun (n+1) 2027	Tahun (n-2) 2024	Tahun (n-1) 2025	Tahun (n) 2026	Tahun (n+1) 2027	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11
1.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (persentase)			-	27,59	27,97	28,35	-	-	27,97	28,35	Target capaian 2024 beda dengan 2025 - 2027
2.	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (persentase)			-	11,47	11,57	11,90	-	-	11,57	11,90	Target capaian 2024 beda dengan 2025 - 2027
3.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian pada level provinsi (persentase)			-	12,66	12,76	12,86	-	-	12,76	12,86	Target capaian 2024 beda dengan 2025 - 2027
4.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (persentase)			-	0,52	0,71	0,90	-	-	0,71	0,90	Target capaian 2024 beda dengan 2025 - 2027
5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)			70	68,85	68,90	68,95	68,65	-	68,90	68,95	

Keterangan : Pada tahun 2024 Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah mempunyai 5 indikator sasaran yaitu ;
 1. Nilai Output Industri (triliun rupiah) 2. Persentase pertumbuhan usaha perdagangan 3. Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi 4. Persentase UKM menjalin kemitraan 5. Nilai Sakip, Sehingga indikator sasarannya berubah dengan indikator sasaran tahun 2025 sampai 2027 sehingga target capaiannya tidak dapat diisi karena beda indikator sasaran.

Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah pada tahun 2026 mempunyai 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya nilai tambah produksi industri pengolahan dengan indikatornya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (persentase);
2. Peningkatan sektor perdagangan dengan indikatornya Kontribusi PDRB sektor perdagangan (persentase);
3. Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UKM dengan indikatornya Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian pada level provinsi (persentase) dan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (persentase);
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikatornya Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin).

Ini merupakan indikator Utama yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan menengah sebagaimana tercantum didalam Renstra Dinas tahun 2025 sampai tahun 2029.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada gambaran umum kondisi daerah pada bab sebelumnya dan sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan; pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; akses dan kualitas pelayanan publik; dan daya saing daerah. Isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Isu merepresentasikan suatu kesenjangan antara praktik korporat dengan harapan-harapan para *stakeholder*. Isu diartikan juga sebagai suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang, yang menyangkut ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, hari kiamat, kematian, ataupun tentang krisis. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis.

Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Riau terlihat dari pemetaan permasalahan seperti tabel di bawah ini :

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Hilirisasi Komoditi Unggulan Provinsi Riau masih Terbatas (Kelapa Sawit, Kelapa Dalam, Karet, Sagu, Kopi, Nenas, Keladi Ungu, dan Ikan Patin)
2. Ekspor Komoditi dan Produk Riau Khususnya Produk IKM/UMKM yang Terbatas dan Belum Berkembang
3. Kurang Berkembangnya Koperasi Aktif dan Sehat yang Memayungi IKM/UMKM

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau sebagai perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang perindustrian juga dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang memberikan corak serta warna dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor industri dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan khususnya produk domestik regional bruto. Hasil identifikasi yang dilakukan dengan pendekatan analisis SWOT, yaitu *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses*(kelemahan), *Opportunities*(peluang), dan *Threats* (ancaman), Dinas Perindustrian Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat diidentifikasi isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan sektor industri sebagai berikut:

a. *Strengths* (Kekuatan)

- 1) Telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Industri Provinsi dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau;
- 2) Telah dibentuknya 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu UPT. Industri Pangan, Olahan dan Kemasan dan UPT. Industri Logam serta Rencana pembentukan UPT baru Kerajinan dan Aneka;
- 3) Potensi sumber kekayaan alam daerah yang tersedia sebagai bahan baku dan bahan penolong;
- 4) Jumlah Industri dan Kecil dan Menengah cukup besar dan mencapai 8.961 IKM;
- 5) Masih berkembangnya produk Industri Kecil dan Menengah berbasis kebudayaan daerah, seperti tenun, batik melayu, dan anyaman;
- 6) Ditetapkannya Provinsi Riau sebagai salah satu Wilayah Pusat Pengembangan Industri, yaitu di Kota Dumai, Kabupaten Siak dan Bengkalis dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN);

- 7) Adanya Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (BPPSI) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kantor Layanan Teknis (KLT) Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia di Pekanbaru;

b. Weaknesses(Kelemahan)

- 1) Industri turunan atau industri hilir yang belum berkembang dan terbatas;
- 2) Kuantitas, kualitas dan konsistensi produk Industri Kecil dan Menengah yang terbatas, sehingga sulit bersaing pangsa pasar;
- 3) Kemasan produk Industri Kecil dan Menengah yang belum memenuhi standart dan kurang menarik;
- 4) Terbatasnya dan lambatnya transfer teknologi dalam meningkatkan kapasistas dan kualitas produksi;
- 5) Terbatasnya kemampuan para pengelola Industri baik aspek teknis produksi maupun manajemen dan permodalan;
- 6) Terbatasnya infrastruktur pendukung (diluar kawasan) dalam pengembangan kawasan industri, seperti jalan dan jembatan, listrik dan air bersih;
- 7) *Mindset* para pelaku industri dalam pengembangan usaha yang menggunakan pola lama, seperti mempertahannya kualitas produk, bentuk kemasan dan permodalan;
- 8) Terbatasnya jumlah tenaga penyuluh perindustrian dalam pembinaan dan pendampingan Industri Kecil dan Menengah, khususnya di Kabupaten/Kota;
- 9) Belum semua Kabupaten/Kota yang telah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- 10) Infrastruktur dan sarana UTP. Industri Pangan, Olahan dan Kemasan dan UPT. Industri Logam masih terbatas, sehingga program/kegiatan peningkatan berupa pelatihan, magang dan inkubator industri tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

c. Opportunities(Peluang)

- 1) Pertumbuhan kontribusi sektor industri terhadap PDRB yang positif dan signifikan;

- 2) Pangsa pasar yang cukup besar baik lingkup daerah, regional, nasional maupun internasional;
- 3) Tumbuh dan berkembangnya pasar-pasar modern seperti *Indomaret*, *Alfamart*, *Hypermart*, *Giant*, dan SuperIndo sampai ditingkat kecamatan;
- 4) Berkembangnya sistem pemasaran produk dengan menggunakan sistem informasi teknologi yang disebut *E.Marketing* atau *E.Smart*, seperti bukalapak.com, shopee.co.id dan tokopedia.com;
- 5) Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan lokal mengunjungi *event* pariwisata daerah dan berkembangnya objek wisata alam baru;
- 6) Adanya sumber pendanaan pembangunan dan pengembangan sektor industri melalui Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 7) Adanya dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
- 8) Adanya dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai sumber pendanaan dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
- 9) Pangsa pasar yang cukup besar baik lingkup daerah, regional, nasional maupun internasional;
- 10) Berkembangnya sistem pemasaran produk dengan menggunakan sistem informasi teknologi yang disebut *E.Marketing* atau *E.Smart*
- 11) Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan lokal mengunjungi *event* pariwisata daerah dan berkembangnya objek wisata alam baru;
- 12) Adanya sumber pendanaan pembangunan dan pengembangan Koperasi dan UKM melalui Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 13) Adanya dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
- 14) Banyaknya event-event nasional atau Pameran nasional yang dapat memasarkan produk-produk lokal
- 15) Adanya dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai sumber pendanaan dalam pengembangan Koperasi dan UKM

d. Threats (ancaman)

- 1) Masuknya barang atau produk import yang berkualitas sebagai kompetitor terhadap produk dalam negeri;
- 2) Masih rendahnya rasa cinta masyarakat terhadap produk Indonesia/ dalam negeri;

- 3) Kebijakan ekonomi global dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan hidup, seperti penggunaan lahan gambut untuk area perkebunan kelapa sawit;
- 4) Banyaknya barang-barang yang berkualitas dari luar yang masuk ke dalam negeri
- 5) Masih rendahnya kualitas barang yang dipasarkan.
- 6) Adanya persaingan pasar bebas.
- 7) Koperasi belum memiliki inovasi di dalam melakukan kegiatannya
- 8) Kurangnya penguasaan IT kepada pengelola dan pengurus Koperasi
- 9) Kurang minatnya masyarakat untuk menjadi anggota koperasi

Untuk mewujudkan Provinsi Riau yang maju, sejahtera dan berdaya saing tinggi, semakin menghadapi banyak permasalahan dan persoalan pembangunan internal maupun eksternal serta perlunya koordinasi yang baik antar wilayah dan antar sektor. Permasalahan dan persoalan yang dihadapi Provinsi Riau meliputi Kapasitas dan kualitas masyarakat serta pemerintahan yang masih rendah, ketahanan sosial budaya, hasil produk sumberdaya alam yang senantiasa mengalami penurunan harga sementara sektor lain yang seharusnya menjadi basis pertumbuhan ekonomi seperti industri dan inovasi belum mampu menggantikan kontribusi sumberdaya alam pertambangan dan pertanian. Belum mampunya sektor industri dan inovasi untuk menjadi pengganti basis ekonomi akibat dari belum tersrukturnya dengan baik dan mendalam sektor industri tersebut, padahal dengan penurunan harga komoditas utama baik hasil migas dan pertanian seharusnya akan memberikan keuntungan yang lebih tinggi bagi sektor industri karena sektor industri akan mendapatkan bahan baku yang lebih murah.

Berbagai permasalahan utama pembangunan industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang di hadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan kawasan Industri. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan kawasan industry, perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola.

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur Pembangunan dan Pengembangan Industri Masih Terbatas

(Jalan dan Jembatan; Power Plan/Listrik; Jaringan Air Bersih; Jaringan Air Limbah)

- 2) Belum Berkembangnya Kawasan Industri (Tanjung Buton di Kab. Siak; Tenayan Raya di Kota Pekanbaru; dan Kuala Enok di Kab. Indragiri Hilir)
- 3) Komoditi dan Produk Riau di Ekspor Tidak Langsung dari Provinsi Riau tetapi di Ekspor melalui Provinsi Lain (Medan, Jakarta, dan Surabaya)
- 4) Produk IKM dan UMKM dihadapkan pada Tiga Permasalahan Pokok yaitu (1) Kuantitas Produk; (2) Kualitas Produk; (3) Kontinuitas Produk
- 5) Koperasi Banyak Bergerak pada Unit Usaha Simpan Pinjam Dan Sangat Terbatas Bergerak pada Unit Produksi
- 6) Sumber Daya Manusia Koperasi yang Terbatas dan Kurang Berintegritas
- 7) Belum Berkembangnya Aksesibilitas Koperasi Kelembaga Keuangan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD), pada hakekatnya merupakan bagian integral yang tak dapat dipisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk membangun sinergitas antara RENJA-PD dan RKPD maka diperlukan melakukan *review*, sehingga diharapkan adanya keselarasan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah secara makro dan tujuan pembangunan sektor industri. Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Riau yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Industri, perdagangan, koperasi dan UKM yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM pada urusan Industri, perdagangan, koperasi dan UKM adalah :

Program Prioritas :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro

(Umkm)

7. Program Pengembangan Umkm
8. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
9. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
10. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
11. Program Pengembangan Ekspor
12. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
13. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
14. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
15. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
16. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program Penunjang :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			3,45 - 3,67	3.082.815.954	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			3,45 - 3,67	3.082.815.954	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian target pembangunan industri pada dokumen perencanaan industri		91,67	3.082.815.954	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian target pembangunan industri pada dokumen perencanaan industri		91,67	3.082.815.954	
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Provinsi	6 dokumen	3.082.815.954	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	6 dokumen	3.082.815.954	6 dokumen	3.082.815.954	

	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		1 dokumen	100.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1 dokumen	879.399.451	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1 dokumen	879.399.451
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		1 dokumen	1.845.867.170	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		1 dokumen	1.845.867.170
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		1 dokumen	71.000.000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		1 dokumen	71.000.000

	Penyediaan Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan Informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahann industri		1 dokumen	80.000.000	Penyediaan Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan Informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahann industri		1 dokumen	80.000.000
	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	Jumlah Objek Pengawasan Jaminan Produk Halal yang dapat diawasi		1 dokumen	206.549.333	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	Jumlah Objek Pengawasan Jaminan Produk Halal yang dapat diawasi		1 dokumen	206.549.333
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin Usaha Industri		100	281.583.715	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin Usaha Industri		100	281.583.715
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		2 dokumen	281.583.715	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		2 dokumen	281.583.715
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi		1 dokumen	212.583.715	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi		1 dokumen	212.583.715

	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.			1 dokumen	69.000.000					
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.			1 dokumen	69.000.000					

	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan Pengelolaan IKM Kab/ Kota se-Provinsi Riau		100	403.954.528	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan Pengelolaan IKM Kab/ Kota se-Provinsi Riau		100	403.954.528	
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		3 dokumen	403.954.528	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		3 dokumen	403.954.528	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		1 dokumen	107.954.689	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		1 dokumen	107.954.689	
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas		1 dokumen	200.000.000	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas		1 dokumen	200.000.000	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas		1 dokumen	95.999.839	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas		1 dokumen	95.999.839	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			72,37	3.764.290.604	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			72,37	3.764.290.604	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan tertib usaha		100	120.910.506	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan tertib usaha		100	120.910.506	
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor		1 dokumen	40.550.031	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor		1 dokumen	40.550.031	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1 dokumen	40.550.031	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1 dokumen	40.550.031	
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Surat Izin usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan berbahaya		1 dokumen	40.360.770	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Surat Izin usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan berbahaya		1 dokumen	40.360.770	

	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1 dokumen	40.360.770	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		dokumen	40.360.770
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)		10000 dokumen	39.999.705	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)		10000 dokumen	39.999.705
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)		10000 dokumen	39.999.705	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)		10000 dokumen	39.999.705
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan		100	138.003.973	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan		100	138.003.973
	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah IKM yang mempergunakan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		50 orang	138.003.973	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah IKM yang mempergunakan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		50 orang	138.003.973
	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Pasar lelang Komoditas		50 orang	138.003.973	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Pasar lelang Komoditas		50 orang	138.003.973
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase disparitas harga sesuai HET dan harga acuan		3	1.827.583.429	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase disparitas harga sesuai HET dan harga acuan		3	1.827.583.429

	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		1 laporan	156.542.488	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		1 laporan	156.542.488	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		1 laporan	156.542.488	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		1 laporan	156.542.488	
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		2 laporan	1.408.748.019	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		2 laporan	1.408.748.019	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		1 laporan	179.961.236	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		1 laporan	179.961.236	

	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1 laporan	1.228.786.783	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1 laporan	1.228.786.783	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi		2 laporan	262.292.922	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi		2 laporan	262.292.922	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		1 laporan	159.024.697	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		1 laporan	159.024.697	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida		1 laporan	103.268.225	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida		1 laporan	103.268.225	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan nilai ekspor		14	182.684.754	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan nilai ekspor		14	182.684.754	

	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan		62 pelaku usaha	182.684.754	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan		62 pelaku usaha	182.684.754
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		62 pelaku usaha	182.684.754	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		62 pelaku usaha	182.684.754
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)		80	1.192.097.595	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)		80	1.192.097.595
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase BPSK dan LPKSM Aktif, serta Pengaduan Konsumen yang Ditangani		100 persen	721.674.292	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase BPSK dan LPKSM Aktif, serta Pengaduan Konsumen yang Ditangani		100 persen	721.674.292
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif		1 BPSK	618.170.624	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif		1 BPSK	618.170.624
	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif		5 LPKSM	103.503.668	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif		5 LPKSM	103.503.668

	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi		1 laporan	470.423.303	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi		1 laporan	470.423.303	
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi		1 laporan	470.423.303	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi		1 laporan	470.423.303	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan produk dalam negeri		22	303.010.347	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan produk dalam negeri		22	303.010.347	
	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang dipromosikan		12 UMKM	155.169.549	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang dipromosikan		12 UMKM	155.169.549	
	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri		12 UMKM	155.169.549	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri		12 UMKM	155.169.549	
	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk/komoditi yang difasilitasi pemasaran		12	147.840.798	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk/komoditi yang difasilitasi pemasaran		12	147.840.798	

	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		12 UMKM	147.840.798	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		12 UMKM	147.840.798	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			0,8289	2.683.249.008	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			0,8289	2.833.249.008	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		14,29	187.543.553	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		14,29	187.543.553	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		5 Unit Usaha	90.000.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		5 Unit Usaha	90.000.000	

	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam		5 Unit Usaha	90.000.000	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam		5 Unit Usaha	90.000.000	
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		5 Unit Usaha	97.543.553	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		5 Unit Usaha	97.543.553	
	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam		5 Unit Usaha	97.543.553	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam		5 Unit Usaha	97.543.553	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Koperasi berkualitas		6,94	207.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Koperasi berkualitas		6,94	207.000.000	

	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi		12 Unit Usaha	107.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi		12 Unit Usaha	107.000.000	
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		12 Unit Usaha	107.000.000	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		12 Unit Usaha	107.000.000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		12 Unit Usaha	100.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		12 Unit Usaha	100.000.000	

	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		12 Unit Usaha	100.000.000	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		12 Unit Usaha	100.000.000
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase pertumbuhan koperasi sehat		100	289.216.770	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase pertumbuhan koperasi sehat		100	289.216.770
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		12 Unit Usaha	289.216.770	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		12 Unit Usaha	289.216.770
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan		12 Unit Usaha	289.216.770	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan		12 Unit Usaha	289.216.770
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Koperasi		100 persen	792.856.622	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Koperasi		100 persen	792.856.622

	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		50 Unit Usaha	792.856.622	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		50 Unit Usaha	792.856.622	
	Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha Produktif, Bernilai tambah, memiliki akses pasar, Akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha		50 Unit Usaha	217.856.622	Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha Produktif, Bernilai tambah, memiliki akses pasar, Akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha		50 Unit Usaha	217.856.622	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi lainnya		40 Keluarga	150.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi lainnya		40 Keluarga	150.000.000	
	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan		15 Kelompok Masyarakat	75.000.000	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan		15 Kelompok Masyarakat	75.000.000	

	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya		12 Unit Usaha	50.000.000	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya		12 Unit Usaha	50.000.000
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya		24 Unit Usaha	75.000.000	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya		24 Unit Usaha	75.000.000
	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Provinsi Riau	30 Unit Usaha	75.000.000	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya		30 Unit Usaha	75.000.000
	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya		24 Unit Usaha	75.000.000	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya		24 Unit Usaha	75.000.000
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan		25 Unit Usaha	75.000.000	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan		25 Unit Usaha	75.000.000

	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang berdaya saing dan produktif		100	1.086.632.063	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang berdaya saing dan produktif		100	1.086.632.063	
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Peningkatan UMKM yang berdaya saing dan produktif		220 Unit Usaha	1.086.632.063	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Peningkatan UMKM yang berdaya saing dan produktif		220 Unit Usaha	1.086.632.063	
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		200 Unit Usaha	886.632.063	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		200 Unit Usaha	886.632.063	
	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi		20 Unit Usaha	200.000.000	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi		20 Unit Usaha	200.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Yang Meningkatkan Skala Usahanya		100 persen	120.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Yang Meningkatkan Skala Usahanya		100 persen	120.000.000	

	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang ditingkatkan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		30 Orang	120.000.000	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang ditingkatkan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		30 Orang	120.000.000	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		0	0	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		0	0	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang Difasilitasi		30 Orang	120.000.000	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang Difasilitasi		30 Orang	120.000.000	
	Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang ditingkatkan skala usahanya		0	0	Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang ditingkatkan skala usahanya		0	0	
	Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar		0	0	Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar		0	0	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			72,02	57.358.268.470	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			72,02	57.358.268.470	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi		100 persen	53.589.914.273	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi		100 persen	53.589.914.273	
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 dokumen	910.000.000	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 dokumen	910.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 dokumen	200.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 dokumen	200.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 dokumen	710.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 dokumen	710.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2424 orang	40.801.562.009	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2424 orang	40.801.562.009	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2424 orang	40.801.562.009	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2424 orang	40.801.562.009	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 laporan	183.492.970	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 laporan	183.492.970	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 laporan	183.492.970	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 laporan	183.492.970	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	18.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	18.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		0	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 orang	18.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 orang	18.000.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen	2.070.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen	2.070.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan yang Disediakan		2 paket	250.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan yang Disediakan		2 paket	250.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket	620.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket	620.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	250.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	250.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		1 laporan	950.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		1 laporan	950.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	1.450.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	1.450.000.000	

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0 unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 unit	950.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 unit	950.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 unit	500.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 unit	500.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3 laporan	4.309.238.560	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3 laporan	4.309.238.560	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan	770.483.522	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan	770.483.522	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 laporan	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 laporan	0	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 laporan	3.538.755.038	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 laporan	3.538.755.038	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	3.847.620.734	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	3.847.620.734	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		7 unit	416.798.580	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		7 unit	416.798.580	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 unit	500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 unit	500.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 unit	100.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 unit	2.230.822.154	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 unit	2.230.822.154	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		25 unit	600.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		25 unit	600.000.000	
UPT. INDUSTRI LOGAM											
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian target pembangunan industri pada dokumen perencanaan industri		91,67	1.000.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian target pembangunan industri pada dokumen perencanaan industri		91,67	1.000.000.000	
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		7 dokumen	1.000.000.000	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		7 dokumen	1.000.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		6 dokumen	500.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		6 dokumen	500.000.000	

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1 dokumen	500.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1 dokumen	500.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan tata kelola birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi		100 persen	480.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan tata kelola birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi		100 persen	480.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah		100	80.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah		100	80.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket	50.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket	20.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 laporan	300.000.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan	300.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		8 unit	100.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		8 unit	100.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1 unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1 unit	50.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		7 unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		7 unit	50.000.000
	JUMLAH				1.480.000.000	JUMLAH				1.480.000.000
UPT. INDUSTRI, PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN										

	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian target pembangunan industri pada dokumen perencanaan industri		91,67	1.549.035.386	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian target pembangunan industri pada dokumen perencanaan industri		91,67	1.549.035.386
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		1 dokumen	1.549.035.386	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		1 dokumen	1.549.035.386
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1 dokumen	1.549.035.386	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1 dokumen	1.549.035.386
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan tata kelola birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi		100 persen	510.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan tata kelola birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi		100 persen	488.156.640
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah		100	80.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah		100	80.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 paket	50.000.000

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket	20.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	10.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 laporan	300.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan	300.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		13 unit	130.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		13 unit	130.000.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1 unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1 unit	50.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 unit	80.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 unit	80.000.000	
	JUMLAH				2.059.035.386	JUMLAH				2.059.035.386	
UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG											
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)		100	830.000.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)		100	830.000.000	
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk diseluruh Kab/Kota	Persentase Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk Seluruh Kab/Kota		100 persen	830.000.000	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk diseluruh Kab/Kota	Persentase Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk Seluruh Kab/Kota		100 persen	830.000.000	
	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan		1000 sertifikat	200.000.000	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan		1000 sertifikat	200.000.000	
	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan		650 dokumen	350.000.000	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan		650 dokumen	350.000.000	
	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau		72 produk	80.000.000	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau		72 produk	80.000.000	

	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan		80 sertifikat	200.000.000	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan		80 sertifikat	200.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan tata kelola birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi		100 persen	460.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan tata kelola birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi		100 persen	460.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah		100	80.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah		100	80.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 paket	50.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket	20.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 laporan	250.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 laporan	250.000.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan	250.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan	250.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		8 unit	130.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		8 unit	130.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1 unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1 unit	50.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	7 unit	80.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	7 unit	80.000.000	
	JUMLAH				1.290.000.000	JUMLAH				1.290.000.000	
UPT. PELATIHAN KOPERASI DAN UMKM											
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian		1006 orang	816.683.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian		1006 orang	816.683.000	

	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian		1006 orang	816.683.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian		1006 orang	816.683.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		1006 orang	816.683.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		1006 orang	816.683.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan tata kelola birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi		100	568.156.640	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan tata kelola birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi		100	568.156.640	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah		100	80.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah		100	80.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	2 paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	2 paket	50.000.000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1 paket	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1 paket	20.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2 paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2 paket	10.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan	3 LAPORAN	438.156.640	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan	3 LAPORAN	438.156.640
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1 laporan	200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1 laporan	200.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1 laporan	238.156.640	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1 laporan	238.156.640
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 unit	50.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 unit	50.000.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1 unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1 unit	50.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0	0	
	JUMLAH				1.384.839.640	JUMLAH				1.384.839.640	
UPT. PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU											
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	Persentase Peningkatan UMKM yang berdaya saing dan produktif		100	450.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	Persentase Peningkatan UMKM yang berdaya saing dan produktif		100	450.000.000	
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan/layanan pemingkatan usaha		100 Unit Usaha	450.000.000	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan/layanan pemingkatan usaha		100 Unit Usaha	450.000.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan		50 orang	200.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan		50 orang	200.000.000	

	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	100 Unit Usaha	250.000.000	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	100 Unit Usaha	250.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya	persen	100 persen	200.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya	persen	100 persen	200.000.000	
	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang dikembangkan dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Unit Usaha	300 Unit Usaha	200.000.000	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang dikembangkan dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Unit Usaha	300 Unit Usaha	200.000.000	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	300 Unit Usaha	200.000.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	300 Unit Usaha	200.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan tata kelola birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi	persen	100	480.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan tata kelola birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi	persen	100	480.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah	persen	100	80.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah	persen	100	80.000.000	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	2 paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	2 paket	50.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1 paket	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1 paket	20.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2 paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2 paket	10.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan	2 laporan	250.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan	2 laporan	250.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1 laporan	250.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1 laporan	250.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	14 unit	150.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	14 unit	150.000.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1 unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1 unit	50.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	13 unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	13 unit	100.000.000	
	JUMLAH				1.130.000.000	JUMLAH				1.130.000.000	
	TOTAL	71.135.622.908				TOTAL	71.135.622.908				

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan dokumen perencanaan disamping dilakukan melalui pendekatan *topdown planning*, juga dilakukan *bottom up planning*, yaitu perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Dalam pengertian dibidang pemerintahan, *bottom up planning* atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator.

Menyadari hal tersebut, berdasarkan kunjungan kerja ke daerah dan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) serta pertemuan dengan para asosiasi dibidang industri dan pelaku industri khusus industri kecil dan menengah, diperoleh berbagai masukan atau harapan masyarakat untuk penyusunan program dan kegiatan. Permasalahan dan usulan masyarakat tersebut setelah dianalisa dan dikelompokan antara lain sebagai berikut:

- a. Tersedianya bahan baku industri yang berlimpah namun tidak ada unit usaha IKM untuk mengolah bahan baku tersebut, misalnya buah Nenas yang dihasilkan di beberapa daerah, yaitu di Kecamatan Sungai Api dan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- b. Terbatas dan mahalnya bahan baku dan bahan penolong, misalnya IKM Kain Tenun Melayu dimana benang emas masih import dari Singapura, IKM Pandai Besi masih menggunakan besi bekas dan tidak *standart*;
- c. Pangsa pangsa yang terbatas untuk kalangan tertentu terhadap produk tenun, batik dan anyaman, sehingga diperlukan diversifikasi produk seperti pembuatan tas, dompet dari batik, tenun dan anyaman yang dipadukan dengan kulit;
- d. Alat produksi yang terbatas seperti yang dihadapi kelompok IKM Pandai Besi di Desa Teratak Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
- e. Disamping itu ditemukan pula alat produksi yang kurang produktif dan perlu revitalisasi, seperti Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Hal ini

berdampak terhadap proses produksi dimana benang tenun mudah putus sehingga kualitas produk tidak sesuai yang diharapkan;

- f. Kemasan produk yang masih sederhana, kurang menarik dan kurang *higienis*, sehingga terbatas dalam pemasaran;
- g. Terbatas pangsa pasar akibat IKM masih dihadapkan pada kualitas, kualitas dan konsisten produk yang terbatas. Sementara itu disisi lain pertumbuhan pasar modern mengalami perkembangan yang pesat telah masuk ke kecamatan dan desa yang dapat digunakan sebagai sarana untuk pemasaran/penjualan produk atau barang yang dihasilkan oleh Industri Kecil dan Menengah tempatan;
- h. Mahal dan besarnya biaya untuk pengurusan persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Sertifikat Halal, Izin Edar, HaKI merk dan *barcoding*;
- i. Keterbatasan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dapat digunakan oleh para IKM dalam proses produksi atau mengolah bahan baku guna memproduksi suatu barang, misalnya: 1) pengolahan gula kelapa, yang masih menggunakan cetakan yang terbuat dari bambu, sehingga produk tidak sama ukuran besar dan berat atau terstandar; 2) pengolahan ikan asap yang dilakukan secara tradisional sehingga kurang *higienis*, dan belum dikemas secara baik sehingga tidak dapat dipasarkan dipasar modern seperti Indomaret dan Alfamart yang berada didaerah tersebut;
- j. Terbatasnya modal untuk membuka dan mengembangkan usaha, dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam pelaksanaan masih meminta persyaratan agunan;
- k. Masih kurang pembinaan dan pendampingan baik aspek produksi maupun manajemen usaha oleh perangkat pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota.
- l. Belum optimalnya dukungan infrastruktur diluar kawasan industri, yaitu jalan dan jembatan, listrik, air bersih, air limbah dan komunikasi, sehingga mengakibatkan: 1) keengganan atau rendahnya minat para calon investor untuk pembangunan/mendirikan industri dalam kawasan industri dan; 2) tingginya biaya produksi yang berdampak kurang kompetitifnya barang/jasa dari produk industri.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Riau

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi ,
Usaha Kecil dan Menengah**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESAR VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Jumlah izin koperasi usaha simpan pinjam (koperasi aktif)	5 unit usaha	
1	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha yang difasilitasi izin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	5 unit usaha	
II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Jumlah Koperasi aktif yang bersertifikasi	15 Unit Usaha	
2	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	15 Unit Usaha	
III	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Jumlah Koperasi berprestasi	24 Unit Usaha	
3	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya	24 Unit Usaha	
IV	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Jumlah SDM koperasi yang ditingkatkan kompetensinya	720 Orang	
4	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kab/Kota	Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian	720 Orang	

V	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Jumlah koperasi aktif	25 Unit Usaha	
5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	25 Unit Usaha	
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Jumlah UMKM yang berdayasaing	200 UMKM	
6	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab/Kota	Jumlah Pemberdayaan Usaha kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	200 Unit Usaha	
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Jumlah UMKM yang naik kelas	100 Unit Usaha	
7	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Kab/Kota	Jumlah Usaha Kecil yang dikembangkan dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	100 Unit Usaha	
VIII	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Jumlah perizinan yang difasilitasi	100 Persen	
8	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor	1 Dokumen	
9	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Penerbitan Surat Izin usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan berbahaya	7 Dokumen	

10	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	9500 Dokumen	
IX	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Jumlah Pasar yang fungsional	100 Persen	
	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Kab/Kota	Jumlah pasar yang difungsikan	24 unit	
X	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Inflasi	100 Persen	
11	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1 Laporan	
12	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2 Laporan	
13	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	3 Laporan	
XI	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase peningkatan ekspor	100 Persen	
14	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	62 Pelaku Usaha	
XII	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	100 Persen	

15	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Jumlah BPSK dan LPKSM Aktif, serta Pengaduan Konsumen yang Ditangani	100 Persen	
16	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Persentase Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk Seluruh Kab/Kota	100 Persen	
17	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Barang Beredar	1 Laporan	
XIII	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Jumlah produk dalam negeri yang dipasarkan	1 Laporan	
18	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Kab/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	12 UMKM	
19	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab/Kota	Jumlah Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	12 UMKM	
XIV	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Jumlah Kawasan Industri/Jumlah SIKIM/Persentase pertumbuhan industri	100 Persen	
20	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	9 Dokumen	
XV	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Jumlah Izin Usaha	60 Izin	
21	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	
XVI	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Jumlah Kawasan Industri yang Beroperasi	100 Persen	

22	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	3 Dokumen	
XVII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran bidang perindustrian, perdagangan dan UKM	100 Persen	
23	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	
24	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab/Kota	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2640 orang/bulan	
25	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab/Kota	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1 Laporan	
26	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab/Kota	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Paket	
27	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah	100 Persen	
28	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab/Kota	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	
29	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	357 Unit	

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan ini berdasarkan usulan daerah Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dari Kabupaten/kota pada kegiatan forum organisasi perangkat daerah yang telah dilaksanakan.

Kegiatan ini diusulkan dalam rangka untuk menjawab isu-isu yang ada di daerah berkaitan dengan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

Isu-isu masalah perindustrian antara lain ;

1. Hilirisasi Produk:

Industri di Riau, khususnya yang berkaitan dengan sawit dan tekstil, disarankan untuk segera melakukan hilirisasi produk untuk mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor dan menghadapi potensi kenaikan tarif impor dari negara lain.

2. Pengembangan Kawasan Industri:

Riau memiliki rencana pengembangan kawasan industri seperti Buruk Bakul, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Isu- isu masalah perdagangan antara lain ;

1. Akses pasar dan jaringan pemasaran dalam dan luar negeri yang masih perlu ditingkatkan;
2. Riau bukan daerah penghasil sehingga kebutuhan pokok masih didatangkan dari daerah tetangga sehingga perlu adanya kerjasama dengan daerah tetangga untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di provinsi riau.

Isu-isu masalah koperasi dan UKM antara lain ;

1. Koperasi dan UKM seringkali kurang memiliki pengetahuan dalam inovasi, riset pasar, serta adaptasi teknologi.
2. Keterbatasan kemampuan pelaku Koperasi dan UKM untuk mengadopsi teknologi digital dan literasi digital.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional), menyatakan bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

RPJP-Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional). Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM-Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program-program kementerian / lembaga dan lintas kementerian / lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Demikian pula halnya dengan pembangunan sektor industri yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka strategi dan arah kebijakannya berupaya untuk pencapain tujuan nasional. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional, dinyatakan bahwa dalam jangka panjang, pembangunan industry harus memberikan sumbangan sebagai berikut: a) Mampu memberikan sumbangan nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; b) Membangun karakter budaya bangsa yang kondusif terhadap proses industrialisasi menuju

terwujudnya masyarakat modern, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai luhur bangsa; c) Menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi dan wirausaha bangsa di bidang teknologi industri dan manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan daya saing industry nasional menghadapi era globalisasi / liberalisasi ekonomi dunia; d) Mampu ikut menunjang pembentukan kemampuan bangsa dalam pertahanan diri dalam menjaga eksistensi dan keselamatan bangsa, serta ikut menunjang penciptaan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat.

Tujuan pembangunan industry jangka panjang adalah membangun industry dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan, yang didasarkan pada tiga aspek yang tidak terpisahkan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan lingkungan hidup. Sedangkan tujuan pembangunan sector industry jangka menengah ditetapkan bahwa industri:

- a. Harus tumbuh dan berkembang sehingga mampu memberikan sumbangan nilai tambah yang berarti bagi perekonomian dan menyerap tenaga kerja secara berarti;
- b. Mampu menguasai pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor;
- c. Mampu mendukung perkembangan sector infrastruktur;
- d. Mampu memberikan sumbangan terhadap penguasaan teknologi nasional;
- e. Mampu meningkatkan pendalaman struktur industri dan mendiversifikasi jenis-jenis produksinya;
- f. Tumbuh menyebar keluar Pulau Jawa.

Sedangkan Sasaran Pembangunan Industri Nasional terdiri dari sasaran jangka panjang dan sasaran jangka menengah. Sasaran jangka panjang adalah: a) Industri manufaktur telah mencapai taraf industry kelas dunia, yang didukung oleh sumber daya produktif, daya kreatif serta kemampuan kompetensi inti industry daerah; b) Seimbang nya sumbangan IKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan sumbangan industry besar; c) Kuatnya jaringan kerjasama (*networking*) antara IKM dan industry besar, serta industri di dunia.

Dari sasaran jangka panjang tersebut, keluaran yang diharapkan adalah Indonesia menjadi Negara Industri Maju Baru, dimana industry akan tunduk pada kaidah ekonomi, juga sadar lingkungan, dan peduli lingkungan sosial. Berdasarkan sasaran jangka panjang tersebut disusunlah sasaran jangka

menengah yaitu:

- a. terselesaikannya permasalahan yang menghambat, dan rampungnya program revitalisasi, konsolidasi dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis dan bencana;
- b. Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar;
- c. Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk olahan;
- d. Semakin meningkatnya daya saing industri untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor;
- e. Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan;
- f. Tumbuh berkembangnya IKM, khususnya industri menengah sekitar tiga kali lebih cepat dari pada industri kecil.

Dari sasaran jangka menengah, keluaran jangka menengah yang diharapkan adalah:

- a) Besarnya kemampuan sector industri untuk menyediakan lapangan kerja baru;
- b) Pulihnya industri yang terpuruk akibat krisis;
- c) Meningkatnya kemampuan daerah menghasilkan produk olahan;
- d) Tumbuhnya industri penunjang, komponen, dan bahan baku industri;
- e) Meningkatnya ekspor secara signifikan;
- f) Terbangunnya pilar-pilar industri masa depan;
- g) Semakin kuatnya struktur industri, dan seimbangnyasumbangan nilai tambah antara industri besar dengan IKM.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), mempertegas keseriusan pemerintah dalam mencapai visi pembangunan industri nasional yaitu “**Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh**”,

yang bercirikan:

- a. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
- b. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan;
- c. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi:

- a. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
- c. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- d. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. Meningkatkan persebaran pembangunan industri keseluruhan wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan;
- g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah:

- a. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
- b. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
- c. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) industri;
- d. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
- e. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
- f. Menyediakan langkah-langkah alternatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;

- g. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
- h. Melakukan pembangunan industry hijau;
- i. Melakukan pembangunan industry strategis;
- j. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan;
- k. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah 2026, dengan mengacu pada kerangka pembangunan rancangan teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 disebutkan bahwa salah satu fokusnya adalah pembangunan ekonomi yang didalamnya terdapat sektor industri. Hal ini dicapai melalui pendekatan pembangunan, yaitu penciptaan nilai tambah ekonomi yang salah satunya adalah sektor industri.

Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan arah kebijakannya dalam bentuk kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi landasan operasional Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, atau dapat dianggap sebagai Norma Standar Operasional Kementerian Koperasi dan UKM sehingga dapat menjadi landasan implementasi program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM RI adalah Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar („naik kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM harus memperhatikan azas ketaatan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang ada, dengan Strategi dan Program yaitu :

Strategi :

- a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b) Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan
Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;

- c) Penguatan kelembagaan usaha;
- d) Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha;

Program :

- 1) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur KUKM
- 3) Peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro
- 4) Peningkatan daya saing UMKMK
- 5) Penguatan kelembagaan koperasi.

Program Unggulan Kementerian Koperasi dan UKM dalam mendukung Pembangunan Perekonomian Nasional.

- 1. Penataan data Koperasi dan UKM melalui sinergi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
- 2. Fasilitasi pembebasan biaya akta notaries bagi pelaku UMKM yang mendirikan Koperasi bersama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI)
- 3. Fasilitasi penguatan peran KUD kerjasama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah dan PT. Pupuk Indonesia.
- 4. Fasilitasi kemudahan perizinan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) secara gratis dan 1 lembar sertifikat oleh Camat kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah.
- 5. Fasilitasi sertifikasi Hak cipta produk KUKM kerjasama dengan Kementerian Hukum dan Ham serta Pemerintah Daerah.
- 6. Penumbuhan dan pengembangan wirausaha dalam mendukung penambahan target 1 (satu) juta wirausaha dalam kerjasama dengan K/L terkait, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan gerakan koperasi.
- 7. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) maksimal sebesarRp. 25 juta dan bunga 9 % per tahun tampa agunan.
- 8. Penyediaan Dana Bergulir LPDB-KUKM dengan bunga pinjaman koperasi sector riil sebesar 5 % per tahun atau setara sebesar 0,2 % per bulan dan KSP dengan bunga pinjaman 8 % per tahun atau setara

dengan 0,3 % per bulan.

9. Dukungan pemasaran bagi produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sistem E-Commerce yang berada Gallery Indonesia Wow.

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun kedepan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 yang bertumpu pada keseimbangan antara pembangunan perdagangan dalam negeri dan pembangunan perdagangan luar negeri. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekspor non migas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestic serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah : *“Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor”*,

Adapun arah kebijakan pembangunan Perdagangan Dalam Negeri adalah *“Peningkatan penataan system distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik”*.

Salah satu peran penting Kementerian Perdagangan dalam agenda pembangunan sector ekonomi adalah melakukan upaya peningkatan ekspor non migas dan jasa yang bernilai. Sasaran perdagangan luar negeri dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor barang dan jasa pada tahun 2025-2029 adalah:

1. Pertumbuhan ekspor produk non-migas rata-rata sebesar 10,5 persen per tahun,;
2. Rasio ekspor jasa terhadap PDB rata-rata sebesar 3,0 persen per tahun; dan
3. Peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur menjadi sebesar 65 persen.

Strategi dalam mewujudkan arah kebijakan meningkatkan ekspor produk non migas dan ekspor jasa bernilai tambah lebih tinggi dan lebih kompetitif di pasar internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ekspor barang bernilai tambah lebih tinggi;
2. Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sector jasa prioritas yang meliputi jasa pendorong ekspor non migas (jasa transportasi, jasa pariwisata dan jasa konstruksi) serta jasa yang mendukung fasilitasi perdagangan dan produktivitas ekonomi (jasa logistic, jasa distribusi dan jasa keuangan).

Selain berperan dalam pembangunan ekonomi melalui modernisasi sector jasa, Kementerian Perdagangan juga berperan dalam penguatan factor utama ekonomi melalui peningkatan efisiensi logistik dan distribusi nasional. Sasaran yang akan dicapai terkait peningkatan efisiensi logistik dan distribusi nasional pada tahun 2025-2029 adalah:

1. Menurunkan rasio biaya logistic terhadap PDB sebesar 5,0 persen per tahun sehingga menjadi 19,2 persen di tahun 2019.
2. Menurunkan rata-rata dwelling time menjadi sebesar 3-4 hari;
3. Terjaganya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu di bawah 9 persen dan koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah rata-rata di bawah 13,6 persen per tahun yang antara lain didukung melalui pembangunan dan / atau revitalisasi / rehabilitasi 5000 pasar rakyat / pasar rakyat.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau telah ditetapkan visi pembangunan industri 2018-2038, yaitu "*Industri Yang Mandiri dan Berdaya Saing*" dengan ciri:

- a. Struktur industri yang kuat, sehat dan berkeadilan dengan pemanfaatan sumber daya alam daerah
- b. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi dalam rangka pengembangan sumber daya alam daerah;
- c. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global melalui peningkatan pangsa pasar produk hasil industri melalui pemanfaatan sumber daya alam daerah.

Untuk mencapai visi pembangunan industri tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) misi, yaitu:

- a. Meningkatkan kemandirian industri melalui pemanfaatan sumber daya alam daerah dan berwawasan lingkungan;
- b. Meningkatkan daya saing industri baik regional, nasional dan global berbasis inovasi dan teknologi;
- c. Meningkatkan pengembangan industri unggulan dan perwilayahan industri.

Sedangkan strategi dalam pencapaian visi dan misi pembangunan industri tersebut

adalah:

- a. Peningkatan produksi industri dan nilai tambah sumber daya alam yang efisien;
- b. Peningkatan kemandirian industri dan berwawasan lingkungan melalui pengembangan perwilayahan industri;
- c. Peningkatan keunggulan kompetitif (daya saing) dalam menghadapi pasar nasional, regional maupun global.

Seiring dengan visi, misi dan strategi pembangunan industri 2018-2038 sebagaimana tersebut diatas pembangunan sektor industri selaras dengan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Berdasarkan telaahan kebijakan nasional dan daerah dalam pembangunan industri sebagaimana dipaparkan, maka dengan mengacu kepada Rencana Strategis, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau 2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya Nilai Tambah Produksi industri Pengolahan, perdagangan dan Daya saing Koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya nilai tambah produksi industri pengolahan 2. Peningkatan sektor perdagangan

	<p>3. Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UKM</p> <p>4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</p>
--	--

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada hakekatnya adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Melalui program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan isu dan permasalahan yang dihadapi.

Dengan mengacu pada program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Program dan Kegiatan Pembangunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, antara lain:

- a. **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**, yang terdiri dari 7 (tujuh) program, yaitu:
1. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
 2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
 3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
 4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
 5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
 6. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

7. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM;
- b. **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**, yang terdiri dari 6 (enam) program, yaitu:
1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
 3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
 4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
 5. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
 6. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
- c. **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**, yang terdiri dari 3 (tiga) Program yaitu :
1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
 2. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
 3. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
- d. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

Adapun kegiatan dan sub kegiatan masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM, kegiatan antara lain

:

- a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
 - Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
 - Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

B. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI, kegiatan antara lain :

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi.
- b. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
 - Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

C. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI, kegiatan antara lain :

- a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan.

D. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN, kegiatan antara lain :

- a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

E. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI, kegiatan antara lain :

- a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
- Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
 - Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

F. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM), kegiatan antara lain :

- a. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan sub kegiatan :
 - Menumbuh kembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan.
 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik

G. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM, kegiatan antara lain :

- a. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah, dengan sub kegiatan :
 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan.

H. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN, kegiatan antara lain :

- a. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor, dengan sub kegiatan :
 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :

- Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- c. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API), dengan sub kegiatan :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

I. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI

PERDAGANGAN, kegiatan antara lain :

- a. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas, dengan sub kegiatan :
- Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas.

J. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG

KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING, kegiatan

antara lain :

- a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi, dengan sub kegiatan :
- Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat distributor dan sub distributor.
- b. Pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan, dengan sub kegiatan :
- Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas Kabupaten/Kota
 - Operasi pasar dalam rangka stabilitasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah.
- c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam

Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya, dengan sub kegiatan :

- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida

K. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR, kegiatan antara lain :

- a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi, dengan sub kegiatan :
 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

L. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN

KONSUMEN, kegiatan antara lain :

- a. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
 - Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
- b. Pelaksanaan Pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - Verifikasi mutu produk
 - Pengembangan layanan pengujian
 - Pengembangan layanan sertifikasi
 - Pengembangan layanan kalibrasi
- c. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

M. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN

PRODUK DALAM NEGERI, kegiatan antara lain :

- a. Pelaksanaan Promosi produk dalam negeri dengan sub kegiatan :
 - Fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri ditingkat Provinsi.
- b. Pelaksanaan Pemasaran penggunaan produk dalam negeri dengan sub kegiatan :
 - Fasilitasi pemasaran penggunaan produk dalam negeri ditingkat Provinsi

N. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

INDUSTRI, kegiatan antara lain :

- a. Penyusunan, penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
 - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri
 - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat
 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
 - Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi

O. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI,

kegiatan antara lain :

- a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi

- Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

P. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL, kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dengan sub kegiatan :
 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data industri, Data kawasan industri serta data lain lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional(SIINas).
 - Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas
 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas

Q. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, kegiatan antara lain :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kelengkapannya
- e. Administrasi umum perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
- g. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- h. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Adapun Rincian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel T-C.33 sebagai berikut :

2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Rp. 33.510.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 33.510.000,00	Rp. 90.000.000,00
2	17	02	1.01	0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 33.510.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 33.510.000,00	Rp. 90.000.000,00
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				Rp. 34.145.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 34.145.000,00	Rp. 114.000.000,00
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Rp. 34.145.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 34.145.000,00	Rp. 114.000.000,00
2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 34.145.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 34.145.000,00	Rp. 114.000.000,00
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				Rp. 13.235.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 13.235.000,00	Rp. 289.216.770,00

2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Rp. 13.235.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 13.235.000,00	Rp. 289.216.770,00
2	17	04	1.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.235.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.235.000,00	Rp. 289.216.770,00
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				Rp. 132.215.876,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 132.215.876,00	Rp. 367.856.622,00
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Rp. 132.215.876,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 132.215.876,00	Rp. 367.856.622,00
2	17	06	1.01	0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 59.800.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 59.800.000,00	Rp. 217.856.622,00
2	17	06	1.01	0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 72.415.876,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 72.415.876,00	Rp. 150.000.000,00
2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Rp. 2.911.545.174,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.911.545.174,00	Rp. 1.336.632.063,00
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				Rp. 2.911.545.174,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.911.545.174,00	Rp. 1.336.632.063,00
2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.253.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.253.000.000,00	Rp. 886.632.063,00
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Rp. 202.249.260,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 202.249.260,00	Rp. 320.000.000,00

2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				Rp. 202.249.260,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 202.249.260,00	Rp. 320.000.000,00
2	17	08	1.01	0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 34.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 34.400.000,00	Rp. 120.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				Rp. 19.572.898,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 19.572.898,00	Rp. 120.910.506,00
3	30	02	1.01		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor				Rp. 4.650.898,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 4.650.898,00	Rp. 40.550.031,00
3	30	02	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.650.898,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.650.898,00	Rp. 40.550.031,00
3	30	02	1.02		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi				Rp. 2.700.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.700.000,00	Rp. 40.360.770,00
3	30	02	1.02	0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.700.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.700.000,00	Rp. 40.360.770,00
3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)				Rp. 12.222.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 12.222.000,00	Rp. 39.999.705,00

3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.222.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 12.222.000,00	Rp. 39.999.705,00
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				Rp. 20.867.720,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 20.867.720,00	Rp. 138.003.973,00
3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas				Rp. 20.867.720,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 20.867.720,00	Rp. 138.003.973,00
3	30	03	1.01	0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.867.720,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.867.720,00	Rp. 138.003.973,00
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING				Rp. 318.847.521,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 318.847.521,00	Rp. 1.565.290.507,00
3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi				Rp. 16.025.245,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 16.025.245,00	Rp. 156.542.488,00
3	30	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.025.245,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 16.025.245,00	Rp. 156.542.488,00

3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			Rp. 302.822.276,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 302.822.276,00	Rp. 1.408.748.019,00
3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 11.166.347,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 11.166.347,00	Rp. 179.961.236,00
3	30	04	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 291.655.929,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 291.655.929,00	Rp. 1.228.786.783,00
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			Rp. 43.256.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 43.256.000,00	Rp. 182.684.754,00
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			Rp. 43.256.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 43.256.000,00	Rp. 182.684.754,00
3	30	05	1.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 43.256.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 43.256.000,00	Rp. 182.684.754,00
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			Rp. 718.160.880,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 718.160.880,00	Rp. 2.022.097.595,00
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 364.639.970,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 364.639.970,00	Rp. 721.674.292,00
3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 348.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 348.500.000,00	Rp. 618.170.624,00
3	30	06	1.01	0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 16.139.970,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 16.139.970,00	Rp. 103.503.668,00

3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 84.200.052,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 84.200.052,00	Rp. 470.423.303,00
3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 84.200.052,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 84.200.052,00	Rp. 470.423.303,00
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				Rp. 76.568.200,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 76.568.200,00	Rp. 305.169.549,00
3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri				Rp. 39.122.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 39.122.000,00	Rp. 155.169.549,00
3	30	07	1.01	0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 39.122.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 39.122.000,00	Rp. 155.169.549,00
3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri				Rp. 37.446.200,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 37.446.200,00	Rp. 150.000.000,00
3	30	07	1.02	0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 37.446.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 37.446.200,00	Rp. 150.000.000,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Rp. 2.249.265.612,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.249.265.612,00	Rp. 5.551.851.340,00
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				Rp. 2.249.265.612,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.249.265.612,00	Rp. 5.551.851.340,00
3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 119.583.662,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 119.583.662,00	Rp. 879.399.451,00
3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua		Rp. 547.354.001,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 547.354.001,00	Rp. 1.845.867.170,00

							Kel/Desa							
3	31	02	1.01	0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 122.849.140,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 122.849.140,00	Rp. 71.000.000,00
3	31	02	1.01	0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.956.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 29.956.000,00	Rp. 206.549.333,00
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				Rp. 76.739.082,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 76.739.082,00	Rp. 281.583.715,00
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				Rp. 76.739.082,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 76.739.082,00	Rp. 281.583.715,00
3	31	03	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 33.359.082,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 33.359.082,00	Rp. 212.583.715,00

3	31	03	1.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 43.380.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 43.380.000,00	Rp. 69.000.000,00
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				Rp. 35.914.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 35.914.000,00	Rp. 95.999.839,00
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				Rp. 35.914.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 35.914.000,00	Rp. 95.999.839,00
3	31	04	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 35.914.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 35.914.000,00	Rp. 95.999.839,00
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp. 46.236.529.225,00	Rp. 1.298.420.902,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 47.534.950.127,00	Rp. 56.556.029.310,00
3	31	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 77.625.169,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 77.625.169,00	Rp. 910.000.000,00
3	31	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 45.417.577,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 45.417.577,00	Rp. 200.000.000,00
3	31	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 32.207.592,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 32.207.592,00	Rp. 710.000.000,00
3	31	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 41.219.100.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 41.219.100.000,00	Rp. 41.619.520.406,00
3	31	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 41.219.100.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 41.219.100.000,00	Rp. 41.619.520.406,00

3	31	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp. 72.088.485,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 72.088.485,00	Rp. 183.492.970,00
3	31	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 72.088.485,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 72.088.485,00	Rp. 183.492.970,00
3	31	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 3.016.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.016.000,00	Rp. 18.000.000,00
3	31	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.016.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.016.000,00	Rp. 18.000.000,00

3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 1.041.352.700,00	Rp. 19.500.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.060.852.700,00	Rp. 2.470.000.000,00
3	31	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 138.992.307,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 138.992.307,00	Rp. 250.000.000,00
3	31	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 80.262.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 80.262.000,00	Rp. 620.000.000,00
3	31	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 82.006.489,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 82.006.489,00	Rp. 250.000.000,00
3	31	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 577.078.008,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 577.078.008,00	Rp. 950.000.000,00
3	31	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 1.418.076,00	Rp. 653.656.375,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 655.074.451,00	Rp. 500.000.000,00
3	31	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.418.076,00	Rp. 653.656.375,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 655.074.451,00	Rp. 500.000.000,00
3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 2.528.076.795,00	Rp. 2.386.527,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.530.463.322,00	Rp. 5.847.395.200,00
3	31	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 826.846.129,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 826.846.129,00	Rp. 770.483.522,00
3	31	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua		Rp. 1.674.524.966,00	Rp. 2.386.527,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.676.911.493,00	Rp. 3.538.755.038,00

3	31	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 111.480.513,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 111.480.513,00	Rp. 500.000.000,00
3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 143.354.408,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 143.354.408,00	Rp. 500.000.000,00
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp. 46.236.529.225,00	Rp. 1.298.420.902,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 47.534.950.127,00	Rp. 56.556.029.310,00	
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 1.041.352.700,00	Rp. 19.500.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.060.852.700,00	Rp. 2.470.000.000,00	
3	31	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 20.940.197,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.940.197,00	Rp. 50.000.000,00	
3	31	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 16.468.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 16.468.000,00	Rp. 20.000.000,00	
3	31	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.984.352,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.984.352,00	Rp. 10.000.000,00	
3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 2.528.076.795,00	Rp. 2.386.527,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.530.463.322,00	Rp. 5.847.395.200,00	

3	31	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 300.000.000,00
3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 777.852.000,00	Rp. 538.878.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.316.730.000,00	Rp. 4.407.620.734,00	
3	31	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 33.560.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 33.560.000,00	Rp. 50.000.000,00	
3	31	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 25.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 25.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	
UPT. INDUSTRI PANGAN, OLAHAN DAN KEMASAN														
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Rp. 2.249.265.612,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.249.265.612,00	Rp. 5.551.851.340,00	
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			Rp. 2.249.265.612,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.249.265.612,00	Rp. 5.551.851.340,00	
3	31	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.174.687.888,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.174.687.888,00	Rp. 1.549.035.386,00	
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp. 46.236.529.225,00	Rp. 1.298.420.902,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 47.534.950.127,00	Rp. 56.556.029.310,00	
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 1.041.352.700,00	Rp. 19.500.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.060.852.700,00	Rp. 2.470.000.000,00	
3	31	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 17.674.560,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 17.674.560,00	Rp. 50.000.000,00	

3	31	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 26.340.329,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 26.340.329,00	Rp. 20.000.000,00
3	31	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.077.420,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.077.420,00	Rp. 10.000.000,00
3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 2.528.076.795,00	Rp. 2.386.527,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.530.463.322,00	Rp. 5.847.395.200,00
3	31	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 300.000.000,00
3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 777.852.000,00	Rp. 538.878.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.316.730.000,00	Rp. 4.407.620.734,00
3	31	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 33.560.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 33.560.000,00	Rp. 50.000.000,00
3	31	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.890.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 19.890.000,00	Rp. 80.000.000,00
UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG														
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				Rp. 718.160.880,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 718.160.880,00	Rp. 2.022.097.595,00
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 269.320.858,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 269.320.858,00	Rp. 830.000.000,00

3	30	06	1.02	0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 60.618.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 60.618.000,00	Rp. 200.000.000,00
3	30	06	1.02	0005	Pengembangan Layanan Pengujian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 102.028.497,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 102.028.497,00	Rp. 350.000.000,00
3	30	06	1.02	0006	Pemantauan Mutu Produk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.900.361,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 29.900.361,00	Rp. 80.000.000,00
3	30	06	1.02	0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 76.774.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 76.774.000,00	Rp. 200.000.000,00
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp. 46.236.529.225,00	Rp. 1.298.420.902,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 47.534.950.127,00	Rp. 56.556.029.310,00
3	30	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp. 516.000.000,00	Rp. 84.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 600.000.000,00	Rp. 600.000.000,00
3	30	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 516.000.000,00	Rp. 84.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 600.000.000,00	Rp. 600.000.000,00

3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp. 46.236.529.225,00	Rp. 1.298.420.902,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 47.534.950.127,00	Rp. 56.556.029.310,00
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 1.041.352.700,00	Rp. 19.500.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.060.852.700,00	Rp. 2.470.000.000,00
3	31	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.367.213,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 12.367.213,00	Rp. 50.000.000,00
3	31	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.092.826,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.092.826,00	Rp. 20.000.000,00
3	31	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.132.670,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.132.670,00	Rp. 10.000.000,00
3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 2.528.076.795,00	Rp. 2.386.527,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.530.463.322,00	Rp. 5.847.395.200,00
3	31	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 250.000.000,00
3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 777.852.000,00	Rp. 538.878.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.316.730.000,00	Rp. 4.407.620.734,00
3	31	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 33.560.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 33.560.000,00	Rp. 50.000.000,00
3	31	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.230.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 16.230.000,00	Rp. 80.000.000,00

UPT. PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH													
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			Rp. 166.170.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 166.170.000,00	Rp. 1.200.000.000,00
2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Rp. 166.170.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 166.170.000,00	Rp. 1.200.000.000,00
2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 166.170.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 166.170.000,00	Rp. 1.200.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp. 46.236.529.225,00	Rp. 1.298.420.902,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 47.534.950.127,00	Rp. 56.556.029.310,00
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 1.041.352.700,00	Rp. 19.500.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.060.852.700,00	Rp. 2.470.000.000,00
3	31	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 16.681.234,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 16.681.234,00	Rp. 50.000.000,00
3	31	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.771.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.771.000,00	Rp. 20.000.000,00
3	31	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.994.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.994.200,00	Rp. 10.000.000,00

2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Rp. 2.911.545.174,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.911.545.174,00	Rp. 1.336.632.063,00
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				Rp. 2.911.545.174,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.911.545.174,00	Rp. 1.336.632.063,00
2	17	07	1.01	0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 599.218.894,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 599.218.894,00	Rp. 200.000.000,00
2	17	07	1.01	0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 59.326.280,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 59.326.280,00	Rp. 250.000.000,00
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Rp. 202.249.260,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 202.249.260,00	Rp. 320.000.000,00
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				Rp. 202.249.260,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 202.249.260,00	Rp. 320.000.000,00
2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 167.849.260,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 167.849.260,00	Rp. 200.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp. 46.236.529.225,00	Rp. 1.298.420.902,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 47.534.950.127,00	Rp. 56.556.029.310,00
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 1.041.352.700,00	Rp. 19.500.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.060.852.700,00	Rp. 2.470.000.000,00
3	31	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.665.895,00	Rp. 19.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 49.165.895,00	Rp. 50.000.000,00

3	31	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.839.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.839.200,00	Rp. 20.000.000,00
3	31	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.984.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.984.800,00	Rp. 10.000.000,00
3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 2.528.076.795,00	Rp. 2.386.527,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.530.463.322,00	Rp. 5.847.395.200,00

3	31	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 250.000.000,00
3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 777.852.000,00	Rp. 538.878.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.316.730.000,00	Rp. 4.407.620.734,00
3	31	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 33.560.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 33.560.000,00	Rp. 50.000.000,00
3	31	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 32.918.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 32.918.000,00	Rp. 100.000.000,00
Jumlah									Rp. 53.288.791.448,00	Rp. 1.298.420.902,00			Rp. 54.587.212.350,00	Rp. 70.537.326.543,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam satuan kerja pelaksanaan program, RKPD Tahun 2026 yang di tindak lanjuti dengan menyusun kebijakan public dalam bentuk kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran setiap tahunnya.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan. Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2026 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi

masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program- program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut;

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD	
Pemerintahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026														
Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH														
Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan														
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
				Tahun - 1	Tahun 2026					Tahun 2027				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)					
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				Rp. 33.510.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 33.510.000,00	Rp. 90.000.000,00
2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Rp. 33.510.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 33.510.000,00	Rp. 90.000.000,00

2	17	02	1.01	0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 33.510.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 33.510.000,00	Rp. 90.000.000,00
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				Rp. 34.145.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 34.145.000,00	Rp. 114.000.000,00
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Rp. 34.145.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 34.145.000,00	Rp. 114.000.000,00
2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 34.145.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 34.145.000,00	Rp. 114.000.000,00
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				Rp. 13.235.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 13.235.000,00	Rp. 289.216.770,00

2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Rp. 13.235.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 13.235.000,00	Rp. 289.216.770,00
2	17	04	1.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.235.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.235.000,00	Rp. 289.216.770,00
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				Rp. 132.215.876,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 132.215.876,00	Rp. 367.856.622,00
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Rp. 132.215.876,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 132.215.876,00	Rp. 367.856.622,00
2	17	06	1.01	0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 59.800.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 59.800.000,00	Rp. 217.856.622,00
2	17	06	1.01	0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 72.415.876,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 72.415.876,00	Rp. 150.000.000,00
2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Rp. 2.911.545.174,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.911.545.174,00	Rp. 1.336.632.063,00
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				Rp. 2.911.545.174,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.911.545.174,00	Rp. 1.336.632.063,00
2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.253.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.253.000.000,00	Rp. 886.632.063,00
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Rp. 202.249.260,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 202.249.260,00	Rp. 320.000.000,00

2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				Rp. 202.249.260,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 202.249.260,00	Rp. 320.000.000,00
2	17	08	1.01	0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 34.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 34.400.000,00	Rp. 120.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				Rp. 19.572.898,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 19.572.898,00	Rp. 120.910.506,00
3	30	02	1.01		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor				Rp. 4.650.898,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 4.650.898,00	Rp. 40.550.031,00
3	30	02	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.650.898,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.650.898,00	Rp. 40.550.031,00
3	30	02	1.02		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi				Rp. 2.700.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.700.000,00	Rp. 40.360.770,00
3	30	02	1.02	0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.700.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.700.000,00	Rp. 40.360.770,00
3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)				Rp. 12.222.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 12.222.000,00	Rp. 39.999.705,00

3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.222.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 12.222.000,00	Rp. 39.999.705,00
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				Rp. 20.867.720,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 20.867.720,00	Rp. 138.003.973,00
3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas				Rp. 20.867.720,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 20.867.720,00	Rp. 138.003.973,00
3	30	03	1.01	0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.867.720,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.867.720,00	Rp. 138.003.973,00
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING				Rp. 318.847.521,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 318.847.521,00	Rp. 1.565.290.507,00
3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi				Rp. 16.025.245,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 16.025.245,00	Rp. 156.542.488,00
3	30	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.025.245,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 16.025.245,00	Rp. 156.542.488,00

3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			Rp. 302.822.276,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 302.822.276,00	Rp. 1.408.748.019,00
3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 11.166.347,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 11.166.347,00	Rp. 179.961.236,00
3	30	04	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 291.655.929,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 291.655.929,00	Rp. 1.228.786.783,00
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			Rp. 43.256.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 43.256.000,00	Rp. 182.684.754,00
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			Rp. 43.256.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 43.256.000,00	Rp. 182.684.754,00
3	30	05	1.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 43.256.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 43.256.000,00	Rp. 182.684.754,00
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			Rp. 718.160.880,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 718.160.880,00	Rp. 2.022.097.595,00
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 364.639.970,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 364.639.970,00	Rp. 721.674.292,00
3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 348.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 348.500.000,00	Rp. 618.170.624,00
3	30	06	1.01	0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 16.139.970,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 16.139.970,00	Rp. 103.503.668,00

3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 84.200.052,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 84.200.052,00	Rp. 470.423.303,00
3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 84.200.052,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 84.200.052,00	Rp. 470.423.303,00
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				Rp. 76.568.200,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 76.568.200,00	Rp. 305.169.549,00
3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri				Rp. 39.122.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 39.122.000,00	Rp. 155.169.549,00
3	30	07	1.01	0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 39.122.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 39.122.000,00	Rp. 155.169.549,00
3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri				Rp. 37.446.200,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 37.446.200,00	Rp. 150.000.000,00
3	30	07	1.02	0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 37.446.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 37.446.200,00	Rp. 150.000.000,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Rp. 2.249.265.612,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.249.265.612,00	Rp. 5.551.851.340,00
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				Rp. 2.249.265.612,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.249.265.612,00	Rp. 5.551.851.340,00
3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 119.583.662,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 119.583.662,00	Rp. 879.399.451,00
3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua		Rp. 547.354.001,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 547.354.001,00	Rp. 1.845.867.170,00

							Kel/Desa							
3	31	02	1.01	0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 122.849.140,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 122.849.140,00	Rp. 71.000.000,00
3	31	02	1.01	0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.956.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 29.956.000,00	Rp. 206.549.333,00
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				Rp. 76.739.082,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 76.739.082,00	Rp. 281.583.715,00
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				Rp. 76.739.082,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 76.739.082,00	Rp. 281.583.715,00
3	31	03	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 33.359.082,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 33.359.082,00	Rp. 212.583.715,00

3	31	03	1.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 43.380.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 43.380.000,00	Rp. 69.000.000,00
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			Rp. 35.914.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 35.914.000,00	Rp. 95.999.839,00	
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Rp. 35.914.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 35.914.000,00	Rp. 95.999.839,00	
3	31	04	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 35.914.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 35.914.000,00	Rp. 95.999.839,00	
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp. 46.236.529.225,00	Rp. 1.298.420.902,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 47.534.950.127,00	Rp. 56.556.029.310,00	
3	31	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 77.625.169,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 77.625.169,00	Rp. 910.000.000,00	
3	31	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 45.417.577,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 45.417.577,00	Rp. 200.000.000,00	
3	31	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 32.207.592,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 32.207.592,00	Rp. 710.000.000,00	
3	31	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 41.219.100.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 41.219.100.000,00	Rp. 41.619.520.406,00	
3	31	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 41.219.100.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 41.219.100.000,00	Rp. 41.619.520.406,00	

3	31	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp. 72.088.485,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 72.088.485,00	Rp. 183.492.970,00
3	31	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 72.088.485,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 72.088.485,00	Rp. 183.492.970,00
3	31	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 3.016.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.016.000,00	Rp. 18.000.000,00
3	31	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.016.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.016.000,00	Rp. 18.000.000,00

3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 1.041.352.700,00	Rp. 19.500.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.060.852.700,00	Rp. 2.470.000.000,00
3	31	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 138.992.307,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 138.992.307,00	Rp. 250.000.000,00
3	31	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 80.262.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 80.262.000,00	Rp. 620.000.000,00
3	31	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 82.006.489,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 82.006.489,00	Rp. 250.000.000,00
3	31	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 577.078.008,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 577.078.008,00	Rp. 950.000.000,00
3	31	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 1.418.076,00	Rp. 653.656.375,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 655.074.451,00	Rp. 500.000.000,00
3	31	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.418.076,00	Rp. 653.656.375,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 655.074.451,00	Rp. 500.000.000,00
3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 2.528.076.795,00	Rp. 2.386.527,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.530.463.322,00	Rp. 5.847.395.200,00
3	31	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 826.846.129,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 826.846.129,00	Rp. 770.483.522,00
3	31	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua		Rp. 1.674.524.966,00	Rp. 2.386.527,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.676.911.493,00	Rp. 3.538.755.038,00

3	31	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 111.480.513,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 111.480.513,00	Rp. 500.000.000,00
3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 143.354.408,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 143.354.408,00	Rp. 500.000.000,00
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp. 46.236.529.225,00	Rp. 1.298.420.902,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 47.534.950.127,00	Rp. 56.556.029.310,00
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 1.041.352.700,00	Rp. 19.500.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.060.852.700,00	Rp. 2.470.000.000,00
3	31	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.940.197,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.940.197,00	Rp. 50.000.000,00
3	31	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.468.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 16.468.000,00	Rp. 20.000.000,00
3	31	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.984.352,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.984.352,00	Rp. 10.000.000,00
3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 2.528.076.795,00	Rp. 2.386.527,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.530.463.322,00	Rp. 5.847.395.200,00

3	31	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 300.000.000,00
3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 777.852.000,00	Rp. 538.878.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.316.730.000,00	Rp. 4.407.620.734,00	
3	31	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 33.560.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 33.560.000,00	Rp. 50.000.000,00	
3	31	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 25.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 25.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	
UPT. INDUSTRI PANGAN, OLAHAN DAN KEMASAN														
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Rp. 2.249.265.612,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.249.265.612,00	Rp. 5.551.851.340,00	
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			Rp. 2.249.265.612,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.249.265.612,00	Rp. 5.551.851.340,00	
3	31	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.174.687.888,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.174.687.888,00	Rp. 1.549.035.386,00	
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp. 46.236.529.225,00	Rp. 1.298.420.902,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 47.534.950.127,00	Rp. 56.556.029.310,00	
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 1.041.352.700,00	Rp. 19.500.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.060.852.700,00	Rp. 2.470.000.000,00	
3	31	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 17.674.560,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 17.674.560,00	Rp. 50.000.000,00	

3	31	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 26.340.329,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 26.340.329,00	Rp. 20.000.000,00
3	31	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.077.420,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.077.420,00	Rp. 10.000.000,00
3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 2.528.076.795,00	Rp. 2.386.527,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.530.463.322,00	Rp. 5.847.395.200,00
3	31	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 300.000.000,00
3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 777.852.000,00	Rp. 538.878.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.316.730.000,00	Rp. 4.407.620.734,00
3	31	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 33.560.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 33.560.000,00	Rp. 50.000.000,00
3	31	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.890.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 19.890.000,00	Rp. 80.000.000,00
UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG														
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				Rp. 718.160.880,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 718.160.880,00	Rp. 2.022.097.595,00
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 269.320.858,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 269.320.858,00	Rp. 830.000.000,00

3	30	06	1.02	0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 60.618.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 60.618.000,00	Rp. 200.000.000,00
3	30	06	1.02	0005	Pengembangan Layanan Pengujian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 102.028.497,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 102.028.497,00	Rp. 350.000.000,00
3	30	06	1.02	0006	Pemantauan Mutu Produk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.900.361,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 29.900.361,00	Rp. 80.000.000,00
3	30	06	1.02	0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 76.774.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 76.774.000,00	Rp. 200.000.000,00
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp. 46.236.529.225,00	Rp. 1.298.420.902,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 47.534.950.127,00	Rp. 56.556.029.310,00
3	30	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp. 516.000.000,00	Rp. 84.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 600.000.000,00	Rp. 600.000.000,00
3	30	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 516.000.000,00	Rp. 84.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 600.000.000,00	Rp. 600.000.000,00

3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp. 46.236.529.225,00	Rp. 1.298.420.902,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 47.534.950.127,00	Rp. 56.556.029.310,00	
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 1.041.352.700,00	Rp. 19.500.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.060.852.700,00	Rp. 2.470.000.000,00	
3	31	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 12.367.213,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 12.367.213,00	Rp. 50.000.000,00	
3	31	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 3.092.826,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.092.826,00	Rp. 20.000.000,00	
3	31	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.132.670,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.132.670,00	Rp. 10.000.000,00	
3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 2.528.076.795,00	Rp. 2.386.527,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.530.463.322,00	Rp. 5.847.395.200,00	
3	31	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 250.000.000,00	
3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 777.852.000,00	Rp. 538.878.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.316.730.000,00	Rp. 4.407.620.734,00	
3	31	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 33.560.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 33.560.000,00	Rp. 50.000.000,00	
3	31	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 16.230.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 16.230.000,00	Rp. 80.000.000,00	

UPT. PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH													
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			Rp. 166.170.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 166.170.000,00	Rp. 1.200.000.000,00
2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Rp. 166.170.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 166.170.000,00	Rp. 1.200.000.000,00
2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 166.170.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 166.170.000,00	Rp. 1.200.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp. 46.236.529.225,00	Rp. 1.298.420.902,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 47.534.950.127,00	Rp. 56.556.029.310,00
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 1.041.352.700,00	Rp. 19.500.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.060.852.700,00	Rp. 2.470.000.000,00
3	31	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 16.681.234,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 16.681.234,00	Rp. 50.000.000,00
3	31	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.771.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.771.000,00	Rp. 20.000.000,00
3	31	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.994.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.994.200,00	Rp. 10.000.000,00

2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Rp. 2.911.545.174,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.911.545.174,00	Rp. 1.336.632.063,00
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				Rp. 2.911.545.174,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.911.545.174,00	Rp. 1.336.632.063,00
2	17	07	1.01	0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 599.218.894,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 599.218.894,00	Rp. 200.000.000,00
2	17	07	1.01	0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 59.326.280,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 59.326.280,00	Rp. 250.000.000,00
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Rp. 202.249.260,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 202.249.260,00	Rp. 320.000.000,00
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				Rp. 202.249.260,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 202.249.260,00	Rp. 320.000.000,00
2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 167.849.260,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 167.849.260,00	Rp. 200.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp. 46.236.529.225,00	Rp. 1.298.420.902,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 47.534.950.127,00	Rp. 56.556.029.310,00
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 1.041.352.700,00	Rp. 19.500.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.060.852.700,00	Rp. 2.470.000.000,00
3	31	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.665.895,00	Rp. 19.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 49.165.895,00	Rp. 50.000.000,00

3	31	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.839.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.839.200,00	Rp. 20.000.000,00
3	31	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.984.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.984.800,00	Rp. 10.000.000,00
3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 2.528.076.795,00	Rp. 2.386.527,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.530.463.322,00	Rp. 5.847.395.200,00
3	31	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 250.000.000,00
3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 777.852.000,00	Rp. 538.878.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.316.730.000,00	Rp. 4.407.620.734,00
3	31	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 33.560.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 33.560.000,00	Rp. 50.000.000,00
3	31	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 32.918.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 32.918.000,00	Rp. 100.000.000,00
Jumlah									Rp. 53.288.791.448,00	Rp. 1.298.420.902,00			Rp. 54.587.212.350,00	Rp. 70.537.326.543,00

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2026 ini pada hakekatnya langkah awal dalam penyusunan dokumen perancangan dan pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Kerja (RENJA) tahun 2026 ini merupakan pedoman dan dasar pada perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang belum terakomodir sebelumnya. Oleh sebab itu Rencana Kerja merupakan bagian integral Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan kata lain penyusunan Rencana Kerja ini didasarkan pada program dan kegiatan yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja dibahas untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* terkait baik lingkup Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sehingga program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Kerja dapat menjawab permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Sektor Industri, perdagangan, koperasi dan UKM.

Berdasarkan analisis terhadap Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau 2025-2029 dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026 maka dalam Rencana Kerja ini memuat 17 (tujuh belas) Program, 31 (tiga puluh satu) kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) sub kegiatan.

Dengan total anggaran sebagaimana tersebut diatas, perlu disikapi terhadap kemampuan keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehubungan itu dalam pelaksanaan perlu menyusun program dan kegiatan prioritas terkait dengan pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dan Kinerja Pemerintah Daerah


Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini disamping sangat tergantung kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislative, dunia usaha, kelompok kepentingan maupun kelompok masyarakat lainnya juga sangat ditentukan oleh sikap mental tekad dan semangat dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan. Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan professional

dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan , pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi optimal.

Dengan demikian hasil-hasil pembangunan dapat merata diseluruh lapisan masyarakat di wilayah Provinsi Riau dan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian maupun pertumbuhan ekonomi pengembangan dan pembangunan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pekanbaru, Oktober 2025

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSIRIAU,**



Ir. H. M. TAUFIQ OESMAN HAMID, MT

Pembina Utama Madya
NIP. 19680718 200003 1 003



**PEMERINTAHAN PROVINSI RIAU
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai 4 dan 5
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. 0761 - 22900, 39596 Fax. 0761- 28066, 39494
PEKANBARU

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU**

Nomor : Kpts. A/1.0/THSPERINDAGKOP.UKM/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU**

- Mengingat** :
- bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau;
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015–2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau (RPJMD) Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3 Tambah Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai tersebut pada Diktum Pertama bertugas ;
- a. Menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau
 - b. Mempersiapkan segala keperluan yang berkaitan dengan data Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tersebut diatas
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal: 02 Oktober 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU,



Ir. H. M. TAUFIQ OESMAN HAMID, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19680718 200003 1 003

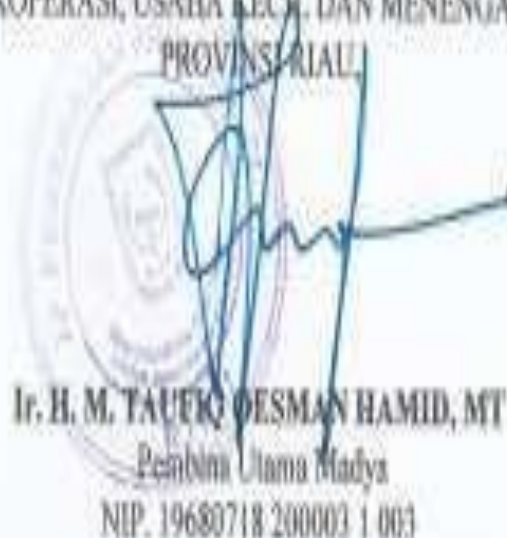
Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau
Nomor : Kpts-41-A/DISPERINDAGROP/UKM/2025
Tanggal : 05 Oktober 2025

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ir. H. M. TAUFIQ OESMAN HAMID, MT	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penanggung Jawab
2	RONI INDRA KESUMA, SE,MSi	Sekretaris	Ketua
3	PIKO TEMPATI, S.STP	Ketua Tim Perencanaan dan Program	Sekretaris
4	TENGGU ARIEF LUKMAN, ST, MM	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi	Koordinator Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi
5	M. YUSUB N., S.I.P., M.Si	Kepala Bidang Sarana, Prasaranan dan Pemberdayaan Industri	Koordinator Bidang Sarana, Prasaranan dan Pemberdayaan Industri
6	TETTY NURDIANTI, SE	Kepala Bidang Perdagangan	Koordinator Bidang Perdagangan
7	AHYU SUHENDRA, SE	Kepala Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Koordinator Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
8	ROMI PASRAH, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Koordinator Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
9	Drs. RAJA HASDIANA DEWI	Kepala UPT. Industri Pangan, Olahan dan Kemasan	Koordinator UPT. Industri Pangan, Olahan dan Kemasan
10	DIEVA SANTI RIANI, SH, M.Si	Kepala UPT. Industri Logam	Koordinator UPT. Industri Logam
11	LOLI FEBRINA, M.Si	Kepala UPT. Pengujian Sertifikasi Mutu Barang	Koordinator UPT. Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12	MURSUDIK,SE	Kepala UPT. Pelatihan Koperasi dan UMKM	Koordinator UPT. Pelatihan Koperasi dan UMKM
13	TRESIANA ANOM SARI, ST, M.MT	Kepala UPT. Pusat Layanan Terpadu UMKM	Koordinator UPT. Pusat Layanan Terpadu UMKM
14	ZULKIFLI HAMZAH, S.Pd	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota
15	IMELDA NOFITTA, SE	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Anggota

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU



Ir. H. M. TAUFIQOESMAN HAMID, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19680718 200003 1 003

FORM VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR

RENJA DISPERINDAGKOP

TAHUN 2026

NO	SUSUNAN	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1.	COVER	JUDUL COVER : "RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2026 DINAS/BADAN..... (sesuai Perangkat daerah masing-masing)	-	✓	Sesuaikan
2.	PERGUB PENETAPAN	Menunggu Peraturan Gubernur Riau tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Riau Tahun 2026	-	✓	Lampirkan Salinan Pergub No. 38 Tahun 2025
3.	DAFTAR ISI	Sesuai dengan Isi Renja Perangkat Daerah	✓	-	
4.	DAFTAR TABEL	Judul Tabel dan Halaman Tabel	✓	-	
5.	BABI	PENDAHULUAN			
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.	✓	-	
	1.2. Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	✓	-	
	1.3. Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.	✓	-	
	1.4. Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	✓	-	

NO	SUSUNAN	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
6.	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024			
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	<p>Berisikan uraian mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; dan 7. Sajikan Tabel T-C.29 	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	- - - - - - -	
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK; 2. Sajikan Tabel T-C.30 	✓ ✓	- -	
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	<p>Berisikan uraian mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan 	✓ ✓ ✓ ✓	- - - -	

NO	SUSUNAN	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan	✓	-	
2.4	Review terhadap RKPD	Berisikan uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat didalam RKPD, atau program, kegiatan dan sub kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan 4. Sajikan Tabel T-C.31	✓ ✓ ✓ ✓	- - - -	
2.5	Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat	Berisikan uraian mengenai : 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Sajikan Tabel T-C.32	✓ ✓ ✓	- - -	
7.	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Berisikan uraian mengenai : Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	✓	-	
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;	✓	-	

NO	SUSUNAN	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		2. Target <u>Indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada Renja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.</u>	✓	-	
	3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Berisikan uraian mengenai : 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan; 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan; 3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan 4. Sajikan Tabel T-C.33	✓ ✓ ✓ ✓	- - - -	
8.	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH			
		Berisikan uraian mengenai : <u>Hasil inputan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada SIPD RI</u> <u>sesuaikan target indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan RKPD</u>	-	✓	- Sesuaikan pagu dengan Rankhir (SIPD)
9.	BAB V	PENUTUP			
		Berisikan uraian mengenai : 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; 3. Rencana tindak lanjut; 4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.	✓ ✓ ✓ ✓	- - - -	

NO	SUSUNAN	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
6	LAMPIRAN	1. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025	V	.	

Pekanbaru, Oktober 2025

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU
Sekretaris,



RONI INDRA KESUMA, SE.,MSI
NIP. 19741022 200112 1 002

Mengetahui,
BAPPEDA PROVINSI RIAU
Kepala Bidang Perekonomian dan SDA



ABDUL MADIAN
NIP. 19750516 200212 1 006

Verifikator:



1. ARIFAH AYUS
NIP. 197212152007012003



2. CYNTHIA ZELLA ADIYANI, S.STP
NIP. 19771214 201102 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH**

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 23300 FAX (0761) 23256

PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026**



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256

email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU	Disusun oleh	JUNAIDI, SE
	Tanggal	19 November 2025
	Direvisi oleh	AULIA OSNA RAHMA WANTO, SH, MH.
	Tanggal	19 November 2025
	Disetujui oleh	RONI COKRO SUBAGIO, SE, M.Si
	Tanggal	19 November 2025

CATATAN HASIL REVIU

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

Uraian Catatan Hasil Reviu	No Indeks KKR
A. Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD);	KKR.001
Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2026 <i>belum</i> sepenuhnya didukung dengan dokumen yang memadai.	
B. Pengujian atas Kesesuaian Sistematika Penulisan dan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)	KKR.002
Penyajian Sistematika penulisan dan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2026 <i>sudah</i> sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Bappeda Provinsi Riau Nomor: 000.7/136/ BAPPEDA-BIDANG. I/2025 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Provinsi Riau Tahun 2026.	
C. Pengujian Atas Kesesuaian Rancangan Akhir Renja-PD dengan Rancangan Akhir RKPD	KKR.003
Rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2026 pada Bab III <i>sudah</i> selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran pada Bab IV Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, akan tetapi rumusan tujuan terdapat perbedaan antara dokumen Renstra dengan Renja dimana rumusan tujuan dalam Renstra <i>"Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan,</i>	

<p><i>Perdagangan dan Daya Saling Koperasi dan UKM</i>, sedangkan dalam Renja <i>"Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau"</i> dan sasaran pada Bab III Renja terhadap sasaran <i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026</i> yang <i>belum</i> disajikan dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2026;</p>	
<p>D. Pengujian Atas Penyusunan Subtansi Antar Bab Rancangan Akhir Renja-PD meliputi :</p>	
<p>1. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada BAB III Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Didasarkan pada Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada BAB II Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)</p>	<p>KKR.004.1</p>
<p>Penetapan Tujuan, Sasaran, sudah didukung dengan Program dan Kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2026, serta penetapan tujuan dan sasaran <i>sudah</i> didasari atas isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau;</p>	
<p>2. Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)</p>	<p>KKR.004.2</p>
<p>Penyajian Subtansi antar Bab pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2026 <i>belum</i> selaras dan mendukung indikator kinerja program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2026.</p>	
<p>3. Keselarasan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat dalam Renstra, RKPD dan Rakhir Renja Perangkat Daerah;</p>	<p>KKR.004.3</p>
<p>Penyajian rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2026 <i>belum</i> selaras dengan Renstra dan RKPD Tahun 2026.</p>	

<p>4. Keselarasan Rumusan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renstra, RKPD dan Rancangan Akhir Renja;</p>	<p>KKR.004.3.1</p>
<p>Penyajian rumusan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2026 <i>belum</i> selaras dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026.</p>	
<p>5. Keselarasan Rumusan Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat dalam Renstra, RKPD dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;</p>	<p>KKR.004.3.2</p>
<p>Penyajian rumusan Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2026 <i>belum</i> sepenuhnya mempedomani target kinerja pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan RKPD Tahun 2026;</p>	
<p>6. Keselarasan Pagu Renstra, RKPD 2025 dengan Pagu Rancangan Akhir Renja 2026;</p>	<p>KKR.004.4</p>
<p>Penyajian Pagu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2026 <i>sudah</i> diselaraskan dengan pagu RKPD Tahun 2026</p>	
<p>7. Penerapan Indikator dan Target SPM/NSPK</p>	<p>KKR.004.5</p>
<p>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tidak melaksanakan Penerapan Indikator dan Target SPM/NSPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.</p>	
<p>HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN</p>	
<p>SARAN</p>	
<p>Berdasarkan hasil rewi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2026, kami memberikan saran kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau melalui Tim Penyusun Rancangan Akhir Renja-PD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2026 agar :</p>	
<p>1. Melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Riau untuk mendapatkan dokumen pendukung dalam melaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2026;</p>	

2. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pada Bab III rumusan tujuan dan sasaran dan rumusan indikator kinerja tujuan dan sasaran pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026.
3. Melakukan penyesuaian/ penyempurnaan penyajian Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Rumusan Indikator dan Target Kinerja antara Renstra, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan melakukan konsultasi dengan Bappeda Provinsi Riau untuk penyempurnaan penyajian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
4. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pagu program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2026 dengan mempedomani pagu yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026 dan Surat Gubernur Riau Nomor 000.7.2.4/Bappeda-Bid I/2025/4818 untuk diinput ke dalam SIPD dengan mempedomani Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah.

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU**



Ir. H. M. TAUFIQ OESMAN HAMID, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680718 200003 1 003

Pekanbaru, 28 November 2025
PENGENDALI MUTU,



Drs. ARMANSYAH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19631231 198303 1 309

